

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No. 3900/PMI-D/SD-S1/2020

**PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM
PENGAWASAN DANA DESA DI DESA BATANG TUMU
KECAMATAN MANDAH KABUPATEN
INDRAGIRI HILIR**

**SKRIPSI**

*Diajukan kepada Fakultas Dakwah Dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S. Sos)*

Oleh:

**MADRI
11541104888**

**JURUSAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU
2020**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI**

كلية الدعوة و علم الاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION SCIENCE

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 18 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 P.O.Box. 1004 Telp. 0761-562223
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: iain-sq@pekanbaru-indo.net.id

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Setelah melakukan bimbingan, arahan, koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya terhadap penulis skripsi saudara:

Nama : MADRI

Nim : 1151104888

Judul Skripsi : Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pengawasan Dan Desa Di
Desa Batang Tumu Kecamatan Mandah Kabupaten Indragilihilir

Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan untuk dimunaqasahkan guna melengkapi tugas dan memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

Harapan kami semoga dalam waktu dekat, yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang ujian munaqasah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian persetujuan ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr Wb

Pembimbing Skripsi

Muhammad Soim, MA
NIK. 130417084

Mengetahui
Ketua Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam

Dr. Aslati, M.Ag
NIP. 19700817 200701 2 031

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
كلية الدعوة و علم الاتصال
FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION SCIENCE
Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 18 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761-562223
Fax. 0761-562052 Web www.uin-suska.ac.id E-mail: iain-sq@pekanbaru-indo.net.id

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **"Peran Badan BPD Dalam Pengawasan Dana Desa di Desa Batang**

Tumu Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir" yang ditulis oleh :

Nama : Madri
NIM : 11541104888
Jurusan : Pengembangan Masyarakat Islam

Telah di Munaqasahkan dalam Sidang Ujian Sarjana pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada:

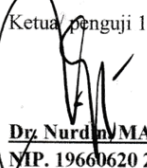
Hari : Selasa
Tanggal : 31 Desember 2019

Sehingga skripsi ini dapat diterima dan disahkan oleh Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau sebagai salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 32 Januari 2020
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi

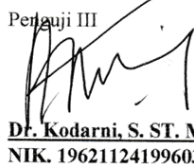

Dr. Nurdin MA
NIP. 19660620 200604 1 015

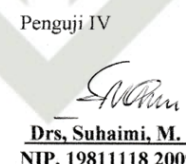
Panitia Sidang Munaqasah

Ketua/Penguji I

Dr. Nurdin MA
NIP. 19660620 200604 1 015

Sekretaris/Penguji II

Dr. Aslami, M. Ag
NIP. 197008172007012031

Penguji III

Dr. Kodarni, S. ST. M. Pd
NIK. 19621124199603 1 001

Penguji IV

Drs. Suhaimi, M. Si
NIP. 19811118 200901 1 006

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI

كلية الدعوة و علم الاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION SCIENCE

Jl. H.R. Soebrandt No. 155 KM. 18 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. 0761-562223
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: iain-sq@pekanbaru-indo.net.id

PENGESAHAN

Proposal : **MADRI** dengan NIM :11541104888 Jurusan : **Pengembangan Masyarakat Islam** dengan judul **“PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PENGAWASAN DANA DESA DI DESA BATANG TUMU KECAMATAN MANDAH KABUPATEN INDRAGILIHILIR “.**

Telah diseminarkan pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 12 Februari 2019

Dengan dapat diterima penulisan skripsi selanjutnya sebagai salah satu syarat mencapai gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 12 Februari 2019

Panitia Seminar Proposal

Penguji

Yefni, S.Ag, M.Si
NIP. 19700914 201411 2 001

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI**

كلية الدعوة و علم الاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION SCIENCE

Jl. H.R. Soebrandt No. 155 KM. 18 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 P.O.Box. 1004 Telp. 0761-562223
Fax. 0761-562052 Web: www.uin-suska.ac.id, E-mail: iain-sq@pekanbaru-indo.net.id

Pekanbaru, 21 Desember 2019

Dosen Pembimbing Skripsi

Nomor : Nota Dinas

Lampiran : 5 (Eksemplar) Skripsi

Hal : Pengajuan Ujian Skripsi

a.n. Madri

Assalamu'alaikum Wr Wb

Setelah kami mengadakan pemeriksaan atau perubahan seperlunya guna kesempurnaan skripsi ini, maka kami sebagai pembimbing skripsi saudara **Madri NIM. 11541104888** dengan judul **"Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pengawasan Dana Desa di Desa Batang Tumu Kecamatan Mandah Kabupaten Indragilihilir"**, telah dapat diajukan untuk mengikuti ujian munaqasah guna memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) dalam bidang Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat, yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang ujian munaqasah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian Surat Pengajuan Ini kami buat atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wasalamu'alaikum Wr Wb

Pembimbing Skripsi

Muhammad soim
NIK. 130417084

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN/ ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Madri
 Nim : 11541104888
 Tempat/ Tanggal Lahir : Batang Tumu, 23 Desember 1995
 Jurusan : Pengembangan Masyarakat Islam
 Judul skripsi : Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pengawasan Dana Desa di Desa Batang Tumu Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir.

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan skripsi ini derdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asil dari saya sendiri. Baik untuk naskah laporan maupun kegiatan yang tercantum sebagai bagian dari skripsi ini. Jika terdapat karya orang lain, saya akan mencantumkan sumber yang jelas.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh dengan karya tulis ini sesuai dengan dengan peraturan yang berlaku di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Sayrif Kasim Riau serta undang-undang yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 23 Desember 2019

Yang membuat pernyataan



Madri
NIM 11541104888

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Nama : Madri
Judul : Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pengawasan Dana Desa di Desa Batang Tumu Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir

Penelitian ini dilatar belakangi oleh keberadaan BPD sebagai lembaga legislatif yang berada diperdasan yang mempunyai peran dalam pengawasan dan desa. Sebagai lembaga legislatif yang sampai saat ini sangat besar pengaruhnya dalam pendanaan dan kinerja pemerintah desa diharapkan BPD bisa menjadi lembaga pengawasan dana desa yang menjalankan perannya dengan baik dalam pengawasan dan desa. Rumusan permasalahan dala penelitian ini adalah bagaimana Peran BPD dalam pengawasan dana desa di Desa Batang Tumu Kecamatan Mandah Kabupaten Indragili Hilir. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Peran BPD dalam pengawasan dana desa di Desa Batang Tumu. Adapun teori yang digunakan yaitu teori Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat dan Utuh yang dikemukakan oleh Prof. Drs. HAW. Widjaja dalam bukunya Dana Alokasi Desa. Adapun jenis penelitian ini yaitu deskritif kualitatif dengan jumlah Informan 7 orang. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan penelusuran data dilapangan dan melakukan pembahasan maka diperoleh kesimpulan bahwa BPD berperan penting dalam pegawasan di Desa Batang Tumu hal ini dibuktikan yaitu BPD mengayomi masyarakat, melinndungi masyarakat, perpihak kepada masyarakat, menyampikan aspirasi masyarakat, menapung keluhan-keluhan masyarakat, dan menidak lanjuti dengan cara disampikan ke instansi dan lembaga terkait.

Kata Kunci: *Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Dalam Pengawasan Dana Desa*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

Name : Madri
Title : The Role of the Village Consultative Body (BPD) in the Supervision of Village Funds in Batang Tumu Village, Mandah District, Indragiri Hilir Regency

This research is motivated by the existence of the BPD as a legislative body that is placed in place which has a role in supervision and the village. As a legislative body that has so far been very influential in the funding and performance of the village government, it is hoped that the BPD can become a village funding oversight body that plays a good role in supervision and the village. The problematic formulation in this research is how the role of BPD in the supervision of village funds in Batang Tumu Village, Mandah Subdistrict, Indragili Hilir Regency. The purpose of this study was to determine the role of BPD in the supervision of village funds in Batang Tumu Village. The theory used is the theory of Village Autonomy Is Original, Round and Whole Autonomy put forward by Prof. Drs. HAW. Widjaja in his book Village Allocation Fund. The type of research is qualitative descriptive with 7 informants. Data collection techniques carried out through observation, interviews, and documentation. Based on field data searches and discussions, it was concluded that BPD plays an important role in monitoring in Batang Tumu Village. This was proven, namely that BPD protects the community, protects the community, sides with the community, communicates the people's aspirations, captures community complaints, and does not follow up by way of delivered to the relevant agencies and institutions.

Keywords: Role of the Village Consultative Body (BPD), in the Supervision of Village Funds

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

KATA PENGANTAR



Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **“Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pengawasan Dana Desa di Desa Batang Tumu Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir”**. Shalawat serta salam semoga senantiasa tetap tercurahkan kepada nabi Muhammad SAW, manusia istimewa yang seluruh prilakunya layak untuk diteladani dan seluruh perkataannya adalah kebenaran. Dan Semoga kita senantiasa tetap istiqomah dalam menjalankan ajaran-ajarannya.

Adapun penulisan skripsi ini bertujuan melengkapi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu (S-1) Pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak, baik itu dukungan secara moril maupun materil. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada Kedua orangtua dan keluarga tercinta yakni Ayahanda Abdul Basri dan Ibunda Rambuana yang selalu menjadi sumber energi kekuatan disaat penulis. Seterusnya ucapan terima kasih kepada :

Prof. Dr. KH. Akhmad Mujahidin, S.Ag., M.Ag sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, dan para Wakil Rektor, beserta staf dan jajarannya yang telah memfasilitasi penulis dalam proses perkuliahan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dr. Nurdin, M. A selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi dan Dr. Masduki, M. Ag selaku Wakil Dekan I, Dr Toni Hartono, M. Si selaku Wakil Dekan II serta Dr. Azni, M. Ag selaku Wakil Dekan III Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dr. Aslati, M. Ag selaku ketua Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Drs. H. Syahril Romli, M. Ag selaku Penasehat Akademik. Terimakasih atas nasehat-nasehat dan arahannya selama penulis melaksanakan proses perkuliahan.

Muhammad Sohim, MA. Selaku pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktunya disela-sela kesibukan guna memberikan bimbingan kepada peneliti dengan ikhlas dan sabar. Serta ucapan terimakasih atas ilmu-ilmu yang telah diberikan kepada penulis.

Yefni, M. Si. selaku dosen penguji Seminar Proposal yang telah memberikan masukan dan perbaikan kepada penulis di dalam penulisan skripsi ini.

7. Seluruh dosen dan civitas akademika Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

8. Kepada seluruh anggota BPD Desa Batang Tumu yang mempermudah segala proses pengambilan data penelitian.

9. Buat sahabat-sahabat Yang selama ini telah membantu kepada Ahmad Zailani, M Taufik, Norman Sah, Azlan Suhaini, Madri, Zikrillah, Arjun Komar, Ides Wanto, Muhammad Amsor, Ahmad Maulana Anshori, Ahmad Rafica MA, Rido Irwansyah, Dede Wahyu, Irfan Afandi, Rizki Maulana, Defi Ria Wijayanti, Siti Aisyah, Nova Al-Ummi, Roza Puspita Sari, Fitri Gusti Rahayu, Annaz Anggrayni, Mitra Yolanda Pratiwi, Salma Sahari Harahap, Delima Nurmala Aisyah Harefa, Reysa Fitri, Arna Yanti, Tumi Lestari, Nurdiana, Sasmi Febyuliani, Malinda Bilqis Dan Neneng Rahayu Prima Dewi. Trimakasih atas bantuan dan motivasinya selama ini, semoga kalian semua sukses selalu. Aamiin.

10. Buat seluruh keluarga Besar dan civitas akademika jurusan Pengembangan masyarakat islam, baik para dosen, alumni, senior dan mahasiswa/i nya yang telah memberikan pelajaran berharga kepada penulis mengenai pentingnya sebuah loyalitas. .



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini yang tidak mungkin disebutkan satu persatu.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa masih belum sempurna, oleh karena itu penulis menerima saran atau kritik, guna kesempurnaan penulisan skripsi. Semoga karya ini memberikan manfaat bagi kita semua. Kelebihan, kebaikan dan kebenaran dalam karya ini hanyalah milik Allah SWT dan semua kekurangan adalah dari penulis semata. Semoga kita semua mendapat Rahmo-Nya. Aamiin.

Pekanbaru, 14 Juli 2019
Penulis

MADRI
NIM. 11541104888

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL DAN GAMBAR	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Alasan Memilih Judul	4
C. Penegasan Istilah	5
D. Rumusan Masalah	6
E. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	6
F. Sistematika Penulisan	7
BAB II KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR	
A. Kajian Teori	8
1. Peran Badan Permusyawaratan Desa	8
2. Pengawasan	16
3. Alokasi Dana Desa	19
B. Kajian Terdahulu	23
C. Kerangka Pikir	23
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian	25
B. Lokasi Dan Waktu Penelitian	25
C. Informan Penelitian	25
D. Sumber Data	25
E. Teknik Pengumpulandata	26
F. Validitas Data	26



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

G. Teknik Analisis Data.....	27
------------------------------	----

BAB IV GAMBARAN UMUM PENELITIAN

A. Kondisi Desa	29
B. Sejarah Desa.....	29
C. Letak Demografi Desa	30
D. Kondisi Pemerintahan Desa Dan Pembagian Wilayah Desa	33

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian	37
1. Pembahasan Dan Menyampaikan Rancangan Peraturan Desa Bersama Kepala Desa	37
2. Menampung Aspirasi Masyarakat.....	39
3. Melakukan Pengawasan	50
B. Pembahasan.....	57
1. Pembahasan Dan menyampaikan rancangan peraturan Desa bersama kepala desa.....	58
2. Menampung Aspirasi Masyarakat.....	60
3. Melakukan Pengawasan.....	63

BAB VI PENUTUP

a. Kesimpulan.....	66
b. Saran.....	66

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

Gambar I. 1	Kerangka Pikir.....	24
Tabel II. 1	Luwas Wilayah.....	31
Tabel II. 2	Jumlah Penduduk Bertdasarkan Jenis Kelamin.....	31
Tabel II. 3	pendidika.....	32
Tabel II. 4	Data keagamaan Desa Batang Tumu Tahun 2019 Jumlah Penduduk.....	32
Tabel II. 5	Data Tempat Ibadah.....	32
Tabel II. 6	Struktur Mata Pencarian.....	33
Tabel II. 7	Jumlah Dusun.....	34
Tabel II. 8	Lembaga Kemasyarakatan	34
Gambat II. 9	Susunan Organisasi Pemerintahan Desa Batang Tumu Kecam	

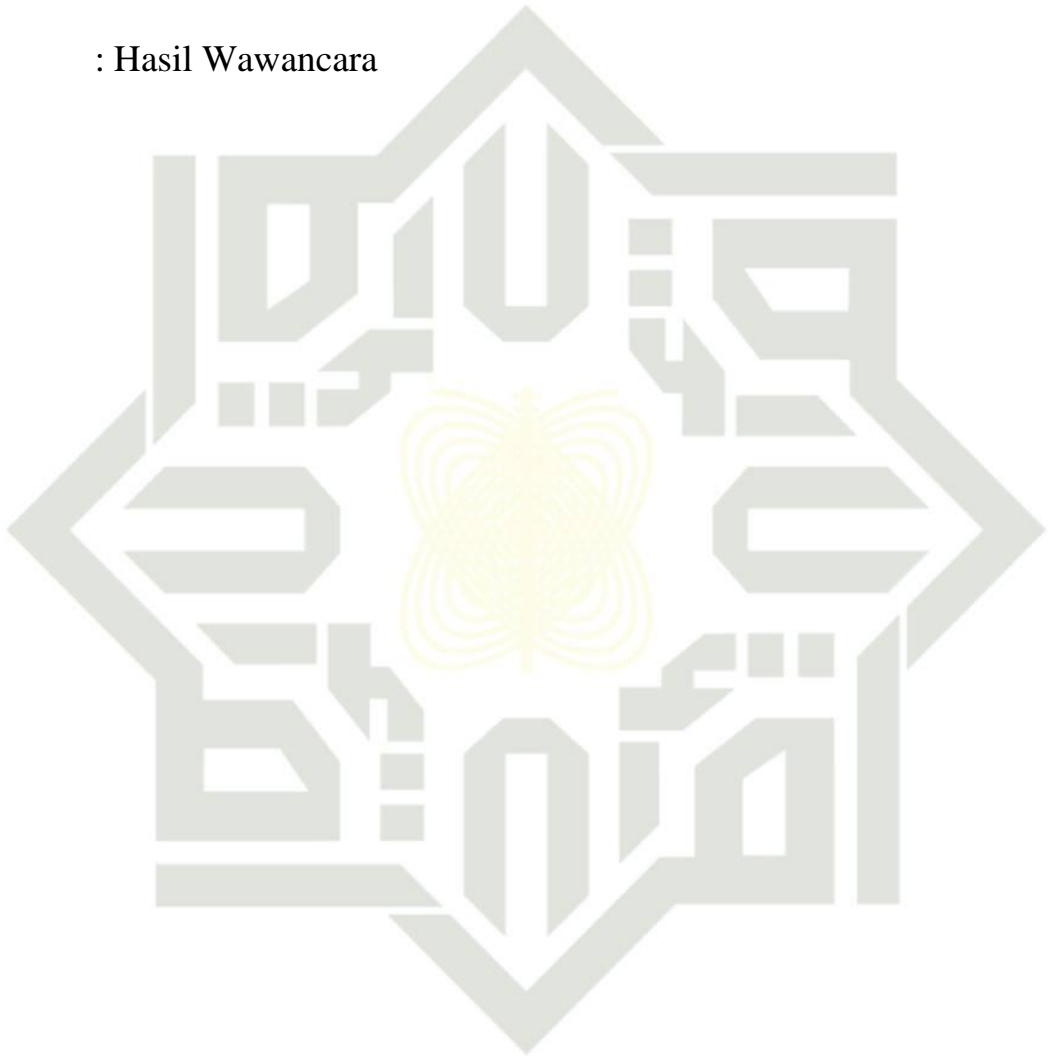


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DATAR LEMPIRAN

Lampiran I	: Kisi-Kisi Intrument Penelitian
Lampiran II	: Deduksi Data
Lampiran III	: Pedoman Wawancara
Lampiran VI	: Hasil Wawancara



UIN SUSKA RIAU

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus ekonomi rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan nomor 22 tahun 1999. Dari pengertian tersebut tampak bahwa daerah di beri hak otonomi oleh pemerintah pusat untuk mengatur dan mengurus kepentingnya sendiri. Dalam hal ini hak dan wewenang yang diberikan terutama mengelola kekayaan alam dan ekonomi rumah tangganya sendiri. Implementasi otonomi daerah telah memasuki era baru setelah pemerintah dan DPR sepakat untuk mengesahkan UU nomer 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan UU nomer 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Tanggung jawab penyelenggaraan pemerintah daerah. Dengan demikian di harapkan masing-masing daerah akan dapat lebih maju, mandiri, sejahtera dan kompetitif di dalam pelaksanaan pemerintahan maupun pembangunan daerahnya masing-masing.¹

Pada masa era reformasi membawa angin segar bagi pelaksanaan otonomi daerah, ketika desentralisasi dan demokrasi lokal mengalami kebangkitan, menyusul lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam undang-undang ini keberadaan BPD menjadi aktor baru pendorong demokrasi, masyarakat berharap bahwa kehadiran BPD menjadi corongan baru bagi demokrasi desa, yakni sebagai artikulator aspirasi dan partisipasi masyarakat, membuat kebijakan secara partisipasi masyarakat dan alat kontrol yang efektif terhadap pemerintah desa. Kehadiran BPD dengan peran dan wewenang yang dimilikinya memungkinkan adanya keseimbangan dan pera saling mengawasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, sehingga keberadaan Kepala desa yang ada pada orde baru seperti “Penguasa tunggal” di desa tidak akan terjadi lagi.

¹ Sani Safitri, Sejarah Perkembangan Otonomi Daerah Di Indonesia, *Jurnal Criksetra*, Vol 5, No 9, Februari 2016. Hal 1



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah merupakan koreksi dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, perubahan yang mencolok terletak pada digantinya istilah Badan Perwakilan Desa menjadi Badan Permusyawaratan Desa, perubahan lainnya bahwa pembentukan keanggotaan BPD tidak melalui pemilihan langsung melainkan melalui musyawarah untuk menentukan keterwakilan dari masing-masing wilayah, dan perubahan yang lebih melemahkan posisi BPD bahwa kepala desa tidak lagi bertanggung jawab kepada badan permusyawaratan desa tapi hanya memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban dan tidak membawa konsekuensi langsung pemberhentian Kepala Desa. Perubahan pengaturan tentang BPD pada undang-undang ini ternyata malah melemahkan kembali eksistensi BPD. Sehingga banyak bermunculan stigma bahwa BPD hanya sebagai alat stempel Kepala Desa.²

Kini desa seakan siuman kembali setelah mengalami tidur panjang (1979-1999), serta pelucutan sebagian besar otonomi aslinya pasca reformasi (1999-2013). Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 setidaknya ingin menjawab dua problem utama, yaitu mengembalikan otonomi asli desa sebagaimana pernah dirampas orde baru, serta pada saat yang sama mengembangkan otonomi desa untuk membatasi intervensi otonomi daerah pasca reformasi. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa menjawab polemik keberadaan BPD dalam Pemerintahan Desa. Batasan pemerintahan desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa semata tanpa posisi BPD. Batasan tersebut berbeda jika dibandingkan dengan pengaturan sebelumnya, dimana pemerintahan desa terdiri dari Pemerintah Desa dan BPD. Namun demikian, walaupun berkedudukan tidak sebagai penyelenggara pemerintahan desa, keberadaan BPD secara fungsi tetap memiliki posisi vital dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Dengan demikian posisi BPD masih sejajar dengan Kepala Desa, karena setiap pengambilan kebijakan turut disertai persetujuan BPD. Selain itu, separasi semacam itu bertujuan untuk menciptakan pemerintahan desa yang lebih modern, dimana secara politik terjadi diferensiasi antara desainer kebijakan BPD dan

² Dasril Radjab, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2005), hal 144



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

implementator kebijakan (Kepala Desa). BPD setidaknya mewakili masyarakat yang dipilih secara demokratis untuk membahas suatu kebijakan sebelum dilaksanakan oleh pemerintah desa. Fungsi/ peran BPD adalah membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa dan melakukan pengawasan kinerja kepala desa. Dari tiga tugas ini sudah jelas BPD adalah lembaga yang memiliki kekuatan dalam menyepakati peraturan desa yang bakal menjadi pedoman pelaksanaan pembangunan desa.

BPD juga memiliki kekuatan untuk menyampaikan aspirasi warga. Penyampaian aspirasi dilakukan melalui beberapa tahap kerja yakni BPD harus melakukan penggalan aspirasi masyarakat, menampung aspirasi masyarakat yang disampaikan ke BPD dan mengelola aspirasi masyarakat sebagai sebuah energi positif dalam merumuskan langkah kebijakan desa. BPD juga menyalurkan aspirasi dari warga desa pada Kepala desa yang kemudian dijadikan pedoman oleh kepala desa beserta jajarannya dalam melaksanakan program pembangunan desanya. Hebatnya, BPD juga sekaligus memiliki kekuatan untuk mengawasi proses pembangunan desa dalam seluruh aspek, ini menunjukkan betapa kuatnya BPD dalam ranah politik dan sosial desa.

Adanya UU NO. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menempatkan desa sebagai subyek bagi pembangunan di wilayahnya sendiri membuat peran BPD mutlak dan penting. Pasalnya, desa yang selama ini diposisikan sebagai obyek, kini telah menjadi subyek bagi pengembangan potensi dirinya sendiri. Selain itu BPD juga berhak menyenggarakan Musyawarah Desa (Musdes) pada agenda-agenda yang mengharuskan adanya Musdes, salahsatunya Musdes membahas rencana atau penggunaan dana desa. Tanpa persetujuan BPD, proses penggunaan dana desa tidak akan berjalan dengan lancar. Sebagai subjek pembangunan tentunya warga masyarakat hendaknya sudah dilibatkan untuk menentukan penggunaan dana desa dan perencanaan pembangunan agar perencanaan penggunaan dana desa dilaksanakan dapat menyentuh langsung kebutuhan masyarakat sehingga program perencanaan pembangunan desa yang akan dilaksanakan, masyarakat dapat berpartisipasi seoptimal mungkin. Ide-ide

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembangunan harus yang didasarkan pada kepentingan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya akan ditampung oleh BPD dan akan dimufakatkan bersama dalam musyawarah pembangunan desa sehingga dana desa dapat direncanakan dengan baik antara pemerintah dengan masyarakat melalui BPD. Namun meskipun memiliki posisi yang sangat strategis, BPD pada kenyataannya banyak yang masih belum optimal dalam menjalankan fungsinya. Seperti yang terjadi di Desa Batang Tumu Kecamatan Mandah Kabupaten Indagilihilir. Banyak tugas pokok dan fungsi dari BPD yang tidak dijalankan secara maksimal. Misalnya, fungsi sebagai pihak yang membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa (Perdes), dalam hal menampung aspirasi warga, sebagai pengawas kinerja kepala desa, dan masih banyak fungsi dan tugas lain yang menunjukkan kinerja yang lemah. Lemahnya fungsi BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dikhawatirkan akan mengganggu mekanisme check and balances. sehingga pada gilirannya akan memperlemah proses demokrasi di tingkat desa.

Berangkat dari latar belakang maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pengawasan dana desa di Desa”.

B. Alasan Memilih judul

Adapun yang menjadi dasar pertimbangan penulis merasa tertarik untuk mengkaji dan membahas masalah ini adalah berikut:

Sejauh ini masalah Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pengawasan dana desa di Desa Batang Tumu Kec. Mandah Kab. Inhil. Belum ada yang meneliti.

Judul yang diteliti sesuai dengan jurusan Pengembangan Masyarakat Islam.

Untuk mengetahui Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pengawalan dan pengawasan dana desadan lokasi penelitian ini mudah untuk menjangkau bagi penulis.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalah pahaman dalam memahami judul penelitian ini, maka penulis perlu menjelaskan istilah-istilah yang digunakan supaya tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda.

Peran

Para ahli menyatakan bahwa secara umum pengertian Peran adalah aspek dinamis dari kedudukan atau status. Menurut Kozier Barbaraperan adalah seperangkat tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai kedudukannya dalam, suatu system. Peran dipengaruhi oleh keadaan sosial baik dari dalam maupun dari luar dan bersifat stabil. Peran adalah bentuk dari perilaku yang diharapkan dari seseorang pada situasi sosial tertentu. Peran adalah deskripsi sosial tentang siapa kita dan kita siapa. Peran menjadi bermakna ketika dikaitkan dengan orang lain, komunitas sosial atau politik. Peran adalah kombinasi adalah posisi dan pengaruh. Seseorang melaksanakan hak dan kewajiban, berarti telah menjalankan suatu peran. Kita selalu menulis kata peran tetapi kadang kita sulit mengartikan dan definisi peran tersebut. Peran biasa juga disandingkan dengan fungsi. Peran dan status tidak dapat dipisahkan. Tidak ada peran tanpa kedudukan atau status, begitu pula tidak ada status tanpa peran. Setiap orang mempunyai bermacam-macam peran yang dijalankan dalam pergaulan hidupnya di masyarakat. Peran menentukan apa yang diperbuat seseorang bagi masyarakat. Peran juga menentukan kesempatan-kesempatan yang diberikan oleh masyarakat kepadanya. Peran diatur oleh norma-norma yang berlaku.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

BPD adalah sebagai lembaga legislasi dan wadah yang berfungsi untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Lembaga ini pada hakikatnya adalah mitra kerja Pemerintah Desa yang memiliki kedudukan yang sejajar dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Adapun Menurut H.A.W Widjaja beliau mengemukakan fungsi dari BPD adalah menetapkan peraturan bersama



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.³ BPD dapat membuat Rancangan Peraturan Desa yang secara bersama-sama Pemerintah Desa ditetapkan menjadi Peraturan Desa. Dalam hal ini, BPD sebagai lembaga pengawasan memiliki kewajiban untuk melakukan kontrol terhadap implementasi peraturan desa serta anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes).⁴

Pengawasan

Pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan melihat kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan tugas atau kegiatan, apakah berjalan dengan mestinya atau tidak.

Dana Desa

Pengalokasian Dana Desa adalah anggaran keuangan yang diberikan pemerintah kepada Desa, yang sumbernya berasal dari bagi hasil pajak daerah serta dari dana daerah serta dari dana pertambahan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten. Sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri No. 37 tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan dana desa.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya maka masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini bagaimana Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pengawasan dana desa di Desa Batang Tumu Kec. Mandah Kab. Inhil?

E. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

Merujuk pada rumusan masalah tersebut maka tujuan yang ingin dicapai penelitian ini adalah untuk mengetahui peran BPD dalam pengawasan dan pengawasan dana desa di Desa Batang Tumu Kecamatan Mandah Kabupaten

³ HAW. Widjaja, Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia, Jakarta: Raja Grafindo Persada 2005, hal. 279

⁴ Widjaja, Pemerintahan Desa/ Marga berdasarkan Undang-undang No. 22

⁵ Luffhi Muhammad, 11 Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (Pekanbaru: UIN SUSKA 2017 Hal. 4)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Indragilihir. Adapun kegunaan yang dicapai ingin diharapkan dari penelitian ini adalah

Secara reoritis, agar dapat meperkaya konsep teori yang menyongkong perkembangan ilmu pengetahuan penulis, khususnya yang terkait masalah peran BPD dalam pengawalan dan pengawasan dana desa di Desa.

Secara praktis, sebagai masukan yang bersipat bagi organisasi sebagai masukkan dan sebagaimana bagi penduduk, dan sebagaimana bahan referensi bagi masyarakat luas.

Sebagai syarat untuk mencapai gelar sarjana S1 pada fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Pekanbaru-Riau.

4. Dapat dijadikan sebagai acuan atau bahan untuk penelitian yang relepan selanjutnya.

F. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari enam bab, masing-masing bab terdiri dari sub-sub yang merupakan suatu kesatuan yang merupakan suatu kesatuann yang utuh, dengan sistemamtika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisikan tentang latar belakang, alasan memilih judul, penegasan istilah.

BAB II : KAJIAN TEORI DAN KERANGAKA TEORI

Bab ini berisikan kajian teori, kajian terdahulu dan kerangka teori pengertian dana desa

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian, bab ini berisi pembasaan yang mencakup jenis penelitian, lokasi penlitian, subjek dan objek penelitian, sumber data teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

DAFTAR PUSTAKA



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN TEORI DAN KERANKA PIKIR

A. Kajian Teori

Dalam pembahasan ini dimaksudkan menggambarkan atau menjelaskan konsep-konsep teori yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas pada bab pembahasan. Adapun penelitian ini dititik beratkan pada kajian Pera BPD Dalam Pengawasan dan Pengawasan Dana Desa.

Peran Badan Permusyawaratan Desa

Istilah peran kerap diucapkan oleh masyarakat umum. Secara umum peran adalah perilaku yang dilakukan oleh seseorang terkait oleh kedudukannya dalam struktur sosial atau kelompok sosial masyarakat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengemukakan peran adalah perangkat tingkat yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat.⁵

Peran adalah suatu tindakan untuk ikut serta bertindak aktif dengan mengoptimalkan kemampuan sesuai dengan bidang dan kapasitasnya masing-masing yang dimaksud untuk memberi manfaat kepada masyarakat sekitar. Peran dapat diartikan sebagai sesuatu yang menjadi bagian terutama dalam terjadinya sesuatu hal yang beristiwa. Peranan di sini diartikan sebagai hal yang sipatnya positif maupun negatif.⁶

Menurut Frideman, peran adalah serangkaian perilaku yang diharapkan pada seseorang sesuai dengan posisi yang diberikan baik secara formal maupun secara informal. Peran didasarkan pada preskripsi (ketentuan) dan harapan peran yang menerangkan apa yang individu-individu harusdalam suatu situasi tertentu agar dapat memenuhi harapan-harapan mereka sendiri atau harapan orang lain menyangkut peran-peran tersebut.

Peran yang artinya perangkat tingkahlaku yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat.⁷ Setiap orang akan

⁵Dendy Sugono Dan Tim Redaksi, *Log Cit.*, hal 1051

⁶Poerwadarimata. *Kamus umum bahasa indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka, 1993),

⁷Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta. Hal. 854

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memiliki peran dalam kehidupan ini, misalnya dilingkungan masyarakat, dilingkungan tersebut tentunya akan terdapat peran yang diambil tiap masing-masing individu, seperti peran sebagai kepala desa, peran alim ulama, peran sebagai anggota masyarakat, dan lain sebagainya. Sedangkan menurut Gros, Mason dan Machern mendefinisikan peranan sebagai perangkat harapan-harapan yang dikenakan pada individu yang menempati kedudukan sosial.⁸

Teori peran (*Role Thery*) adalah teori yang merupakan perpaduan berbagai teori, orientasi, maupun disiplin ilmu. Istilah “peran” diambil dari dunia teater, dalam teater seseorang aktor harus bermain sebagai seorang tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh itu ia diharapkan untuk berperilaku secara tertentu.⁹

Menurut Abu Ahmadi (1982) peran adalah suatu kompleks pengharapan manusia terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu yang berdasarkan status dan fungsi sosialnya. Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto, yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Dari hal diatas lebih lanjut kita lihat pendapat lain tentang peran yang telah ditetapkan sebelumnya disebut sebagai peranan normatif. Sebagai peran normatif dalam hubungannya dengan tugas dan kewajiban BPD dalam melakukan pengawasan secara total enforcement, yaitu melakukan pengawasan secara penuh, Soerjono Soekanto, Sedangkan peran ideal, dapat diterjemahkan sebagai peran yang diharapkan dilakukan oleh pemegang peranan tersebut. Misalnya BPD sebagai suatu organisasi formal tertentu diharapkan berfungsi dapat bertindak sebagai pengayom bagi masyarakat dalam rangka mewujudkan, terasparansi yang mempunyai tujuan akhir kesejahteraan masyarakat, artinya peranan yang nyata. Soerjono Soekanto, Peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan (status) yang dimiliki oleh

⁸ Davit Bery, *Op. Cit*, hal. 105

⁹ Adisasmita, Rahardjo. *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan*. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), Hal ,175.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seseorang, sedangkan status merupakan sekumpulan hak dan kewajiban yang dimiliki seseorang apabila seseorang melakukan hak-hak dan kewajibankewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu fungsi. Hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Kepribadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan. Peran yang dimainkan hakekatnya tidak ada perbedaan, baik yang dimainkan/ diperankan pimpinan tingkat atas, menengah maupun bawah akan mempunyai peran yang sama Peran merupakan tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang yang menempati suatu posisi di dalam status sosial, syarat-syarat peran mencakup 3 (tiga) hal, yaitu : Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan. 12 Peran adalah suatu konsep perilaku apa yang dapat dilaksanakan oleh individu-individu dalam masyarakat sebagai organisasi.

Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu, yang penting bagi struktur sosial masyarakat. Peran adalah suatu rangkaian yang teratur yang ditimbulkan karena suatu jabatan. Manusia sebagai makhluk sosial memiliki kecenderungan untuk hidup berkelompok. Dalam kehidupan berkelompok tadi akan terjadi interaksi antara anggota masyarakat yang satu dengan anggota masyarakat yang lainnya. Tumbuhnya interaksi diantara mereka ada saling ketergantungan. Dalam kehidupan bermasyarakat itu munculah apa yang dinamakan peran (role). Peran merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan seseorang, apabila seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka orang yang bersangkutan menjalankan suatu peranan. Untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas ada baiknya terlebih dahulu kita pahami tentang pengertian peran.¹⁰

¹⁰ Soekanto, Soerjono, Sosiologi Hukum dalam Masyarakat, (Jakarta: PT Rajawali, 1987), p. 220.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Kahn, teori peran (role theory) merupakan penekanan sifat individual sebagai pelaku sosial yang mempelajari perilaku yang sesuai dengan posisi yang ditempati di masyarakat. Peran (role) adalah konsep sentral dari teori peran (Shaw & Constanzo 1970). Dengan demikian kajian mengenai teori peran tidak lepas dari definisi peran dan berbagai istilah perilaku didalamnya. Peran mencerminkan posisi seseorang dalam sistem sosial dengan hak dan kewajiban, kekuasaan dan tanggung jawab yang menyertainya. Untuk dapat berinteraksi satu sama lain, orang-orang memerlukan cara tertentu guna mengantisipasi perilaku orang lain. Peran melakukan fungsi ini dalam sistem sosial. Seseorang memiliki peran, baik dalam pekerjaan maupun di luar itu. Masing – masing peran menghendaki perilaku yang berbeda – beda. Dalam lingkungan pekerjaan itu sendiri seorang karyawan mungkin memiliki lebih dari satu peran, seorang karyawan bisa berperan sebagai bawahan, penyelia, anggota serikat pekerja, dan wakil dalam panitia keselamatan kerja.¹¹

Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan dan status, apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Dari hal diatas lebih lanjut kita lihat pendapat lain tentang peran yang telah ditetapkan sebelumnya disebut sebagai peranan normatif. Peran yang diharapkan dilakukan oleh pemegang peranan tersebut. diharapkan berfungsi dalam penegakan hukum dapat bertindak sebagai pengayom bagi masyarakat dalam rangka mewujudkan ketertiban, keamanan yang mempunyai tujuan akhir kesejahteraan masyarakat, artinya peranan yang nyata, (Soerjono Soekanto). Peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan yang dimiliki oleh seseorang, sedangkan status merupakan sekumpulan hak dan kewajiban yang dimiliki seseorang apabila seseorang melakukan hak-hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu fungsi. Hakekatnya peran juga dapat dirumuskan

¹¹ Lidya Agustina, Pengaruh Konflik Peran, Ketidakjelasan Peran, dan Kelebihan Peran terhadap Kepuasan Kerja dan Kinerja Auditor, *Jurnal Akuntansi*, (Vol.1 No.1 Mei 2009), hal. 42



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Kepribadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan. Peran yang dimainkan hakekatnya tidak ada perbedaan, baik yang dimainkan/ diperankan pimpinan tingkat atas, menengah maupun bawah akan mempunyai peran yang sama. Peran merupakan tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang yang menempati suatu posisi di dalam status sosial, syarat-syarat peran mencakup 3 (tiga) hal, yaitu : Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan. Peran adalah suatu konsep perilaku apa yang dapat dilaksanakan oleh individu-individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu, yang penting bagi struktur sosial masyarakat. Peran adalah suatu rangkaian yang teratur yang ditimbulkan karena suatu jabatan. Manusia sebagai makhluk sosial memiliki kecenderungan untuk hidup berkelompok. Dalam kehidupan berkelompok tadi akan terjadi interaksi antara anggota masyarakat yang satu dengan anggota masyarakat yang lainnya. Tumbuhnya interaksi diantara mereka ada saling ketergantungan. Dalam kehidupan bermasyarakat itu munculah apa yang dinamakan peran (role). Peran merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan seseorang, apabila seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka orang yang bersangkutan menjalankan suatu peranan. Dari beberapa pengertian diatas, penulis menyimpulkan bahwa peran adalah suatu sikap atau perilaku yang diharapkan oleh banyak orang atau sekelompok orang terhadap seseorang yang memiliki status atau kedudukan tertentu.¹²

BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa.¹³ Pada Peraturan pemerintahan Desa No. 72 tahun 2005

¹² Putri Robiatul Adawiyah, Peran dan Upaya Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Dalam Implementasi Peraturan Daerah Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Banyuwangi, *Jurnal Politico*, (Vol 18, No 1 Maret 2018), hal. 116-117

¹³ *Undang-Undang Desa No 6. Op.Cil*, hlm 78

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tentang desa dijelaskan bahwa BPD. Berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa dan merupakan wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Masa keanggotaan BPD adalah 6 (enam) tahun sejak tanggal peresmian dan dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa keanggotaan.¹⁴ Jumlah anggota BPD pada pasal 32 ditentukan berdasarkan jumlah penduduk yang bersangkutan, dengan ketentuan;

- a. Jumlah penduduk sampai 1500 jiwa, 5 orang anggota.
- b. 1501 sampai dengan 2000 jiwa, 7 orang anggota.
- c. 2001 sampai dengan 2500 jiwa, 9 orang anggota.
- d. 2501 sampai dengan 3000 jiwa, 11 orang anggota.
- e. Lebih dari 3000 jiwa, 13 orang anggota.¹⁵

Selanjutnya pada Pasal 37 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dinyatakan bahwa:

- a. Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terdiri dari ketua dan Wakil ketua
- b. Wakil ketua sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebanyak-banyak 2 orang sesuai dengan jumlah anggota BPD
- c. BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipilih dari oleh anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) secara langsung dalam rapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) diadakan secara khusus
- d. Rapat pemilihan pemimpin BPD untuk pertama kalinya dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu anggota termuda.¹⁶

BPD memiliki peran yang sangat penting didalam pengawasan dana desa karena sebagai unsur lembaga yang paling dekat dengan masyarakat oleh karena itu, sesuai dengan tujuan dibentuknya BPD diharapkan dapat terwujudnya suatu proses demokrasi yang baik dimulai dari sistem pemerintahan terkecil yaitu desa BPD dapat dianggap sebagai perlemennya desa. BPD merupakan lembaga baru di era otonomi daerah di Indonesia. BPD

¹⁴ *Ibid*, hlm. 23

¹⁵ *Loc. Cit*, hlm, 207

¹⁶ *Ibid*, hlm, 208

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memiliki kedudukan sejajar dengan pemerintahan desa, dengan fungsi utama pengawasan kinerja pemerintahan desa (fungsi legislasi) meliputi pengawasan pelaksanaan peraturan desa. BPD terbentuk sebagai salah satu implementasi dari pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah yang erat kaitannya dengan pemerintahan desa dikenal sebagai Badan Permusyawaratan Desa. Berdasarkan atas pergantian undang-undang tersebut dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 maka kata perwakilan diganti dengan Permusyawaratan dengan demikian Badan Perwakilan Desa diganti dengan BPD. Sesuai dengan fungsi maka BPD ini dapat dikatakan sebagai lembaga Permusyawaratan atau DPR kecil yang berada di desa yang mewadahi aspirasi masyarakat desa. Dasar Hukum BPD Dalam Mengawasi Dana Desa.

Badan Permusyawaratan Desa yang merupakan lembaga yang mempunyai pengawasan diharapkan bisa menjalankan perannya secara sungguh-sungguh terutama dalam hal penggunaan anggaran. Undang-Undang dan Peraturan. Pemerintah sudah memberikan payung hukum yang jelas hingga BPD tidak perlu ragu dalam menjalankan fungsinya untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa. adanya mekanisme check and balance ini akan meminimalisir penyalahgunaan keuangan desa. Adapun dasar hukum yang melindungi BPD saat melakukan pengawasan dana desa ialah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. adalah undang-undang hasil revisi atau perbaruan dari UU sebelumnya. Lebih di tekankan lagi pada Pasal 55 disebut:

adapun peran BPD sebagai berikut;

- a. Membahas dan menyepakati Rencana Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa; dan
- c. Melakukan pengawasan kinerja kepala desa.

Pada Pasal 55 huruf c yang mengatakan bahwa BPD mempunyai fungsi melakukan pengawasan kinerja kepala desa inilah poin inti BPD yang menjadi landasan untuk mengawasi kinerja kepala desa khususnya dibagian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengalokasian dana desa. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang petunjuk pelaksanaan Undang-Undang Desa.

Pada Pasal 48:

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban, kepala desa wajib

- a. Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada bupati/walikota;
- b. Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada bupati/walikota;
- c. Menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran.

Lebih lanjut dalam Pasal 51:

- a. Kepala desa menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf c setiap anggaran kepada BPD secara tertulis paling lambat tiga bulan berakhirnya tahun anggaran.
- b. Laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 paling sedikit memuat pelaksanaan peraturan Desa.
- c. Laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 digunakan oleh BPD dalam melaksanakan fungsi¹⁷ Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 1999 tentang pedoman.

Umum pengaturan mengenai desa pasal 36 BPD mempunyai fungsi dan peran BPD

- a. Pembahasan dan Menyampaikan Rancangan Peraturan Desa Bersama Kepala Desa.
- b. Mengayomi yaitu menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang di desa yang bersangkutan sepanjang menunjang kelangsungan pembangunan.

¹⁷Bambang Trisantono Soemantri, Pedoman Penyelenggara Pemerintahan Desa (Bandung: Fokus Media, 2011), h. 14

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Menampung aspirasi masyarakat yaitu menagani dan menyalurkan aspirasi yang diterima dai masyarakat kepada pejabat atau instansi yang berwenang.
- d. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa.¹⁸

2. Pengawasan

- a. pengertian dan pengawasan

Pengawasan adalah segala usaha utau kegiatan untuk mengetahui dan melihat kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan tugas atau kegiatan, apakah berjalan dengan mestinya atau tidak.¹⁹ Schermerhorn (2002) mendefinisikan pengawasan sebagai suatu proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut. Berdasarkan pengertian ini Schermerhorn menekankan fungsi pengawasan pada penetapan standar kinerja ini yang akan menjadfi ukuran apakah pada pelaksanaan nanti, perlu melakukan tindakan koreksi ataukah tidak sekiranya ditemukan beberapa atau beberapa penyimpangan.²⁰

Pejelasan ini sejalan dengan Stoner, Freeman dan Gibert (2000)dimana menurut mereka *Control* adalah *the proress of ensurung thatactual aktivitas conform the plannd activities*. Jadi pengawsan adalah proses untuk memastikan bahwa segala aktivitas yang terlaksana sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Secara lebih lengkap Mocklor dalam Stoner, Freeman dan Gilbert (2000) mengemukakan fungsi pengawasan adalah upaya sistematis dalam menetapkan standar kinerja dari berbagai tujuan yang direncanakan, mendesain sistem informasi umpan balik, membandingkan antara kinerja yang dicapai dengan standar yang telah ditetapkan seblumnya, menentukan apakah tedapat penyimpangan dan tingkat signifikansi dan setiap penyimpangan tersebut, dan mengambil

¹⁸ Undang-Undang No 64 Tahun 1999 Tentang Desa, h.12

¹⁹ Sujamto, *Ibid*, hlm 63

²⁰ Ernia Tisnawati Sule dan Kurniawan Suefullah, *Pengantar Manajemen*, (Jakarta Penada Media Group), hlm 317

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tindakan yang diperlukan untuk memastikan bahwa seluruhnya digunakan secara efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan.

Pengertian Mockler secara lengkap menguraikan bahwa pada intinya pengawasan tidak banyak berfungsi untuk menilai apakah sesuatu itu berjalan ataukah tidak, akan tetapi termasuk tindakan koreksi yang mungkin diperlukan maupun penentuan sekaligus standar yang terkait dengan pencapaian tujuan waktu kewaktu. Pengawasan merupakan langkah dan sekaligus salah satu fungsi organik manajemen yang sangat penting dari fungsi-fungsi BPD yang lainnya, dikatakan demikian karena melalui pengawasanlah dapat dikatakan apakah fungsi-fungsi dilaksanakan dengan baik atau tidak.

b. Tujuan pengawasan

Tujuan dan fungsi pengawasan sebagai suatu proses pengamatan dan seluruh pelaksanaan kegiatan organisasi untuk manajemen agar semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Proses pelaksanaan tersebut bertujuan untuk tercapainya tujuan sesuai dengan rencana yang telah dirumuskan.²¹ Tujuan dilakukannya pengawasan adalah untuk mengetahui dan memahami kenyataan yang sebenarnya tentang objek pengawasan, apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak sebagai bahan untuk melakukan perbaikan dimasa yang akan datang. Pada dasarnya pengawasan harus dapat mengukur apa yang harus dicapai, menilai pelaksanaan serta mengadakan tindakan perbaikan dan penyesuaian yang dianggap perlu.

c. fungsi pengawasan

Fungsi pengawasan diperlukan untuk memastikan apakah yang telah direncanakan dan diorganisasikan berjalan sebagaimana mestinya., maka fungsi pengawasan itu juga melakukan proses untuk mengoreksi kegiatan yang sudah agar dapat tetap tercapai apa yang telah ditencanakan.

d. Jenis pengawasan

1. Pengawasan dari segi waktu

Sondang, P Siagian, *Filsafat Administrasi*, (Jakarta Gunung Agung, 2004), hlm 112

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengawasan dari segi waktu dapat dilakukan secara preventif dan secara represif. Alat yang dipakai untuk pengawasan preventif ialah perencanaan dan *budget*, sedangkan pengawasan secara represif ialah perencanaan menggunakan alat budget.

2. Pengawasan dari segi objek

Pengawasan dari segi objek ialah pengawasan terhadap produksi, keuangan, aktivitas karyawan, dan sebagainya. Ada juga yang mengatakan Pengawasan dari segi objek merupakan pengawasan administratif ialah pengawasan anggaran, inspeksi dan pengawasan order (*standing orders*) dan pengawasan kebijaksanaan (*policies control*).

3. Pengawasan dari segi subjek

Pengawasan dari segi subjek terdiri dari Pengawasan intern dan Pengawasan ekstern²²

e. Langkah-langkah dalam melakukan Pengawasan

Proses Pengawasan ialah tahapan-tahapan dari suatu tindakan yang menentukan tentang apa yang harus dikerjakan, sehingga dapat menjadi jaminan atau suatu yang dilakukan sejalan dengan perencanaan sertasegala sesuatu yang menjadi terlaksana. Menurut Stoner, Freeman dan Glibart (2000) adapun langkah dalam proses pengawasan meliputi

1. Penetapan standar dan metode penilaian kinerja

Terhadap tiga alasan mengapa tujuan harus ditetapkan dengan jelas dan memuat standar pencapaian tujuan. *Pertama*, bahwa sering kali tujuan terlalu bersifat umum sehingga sulit untuk dinilai pada saat implementasi dilakukan. *Kedua*, berdasarkan alasan pertama tersebut, sebaiknya tujuan ditetapkan memuat standar yang lebih jelas dinyatakan. *Ketiga*, bahwa kejelasan dan kelengkapan tujuan memudahkan dalam melakukan komunikasi termasuk juga menentukan metode yang akan digunakan dalam mengevaluasi standar yang telah ditetapkan.

2. Penilaian kinerja

²² Yayat M Herujilo, *Dasar-Dasar Manajemen*, (Jakarta. PT Grasindo, 2001), hlm 243

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada dasarnya penilai kerja adalah upaya membandingkan kinerja yang dicapai dengan tujuan dan standar yang telah ditetapkan semula. Penilaian kinerja merupakan sebuah proses yang berkelanjutan dan terus-meneru.

3. penilaian apakah kinerja memenuhi standar atau tidak

Secara garis besar ada tiga kemungkinan hasil penilaian antara kinerja dengan standar yaitu: baik, standar. dan buruk.

4. Pengambilan tindakan koreksi

Dari tahap sebelumnya melalui perbandingan antara kinerja dengan standar kita dapat mendapatkan informasi dari proses pengawasan yang kita lakukan bahwa kinerja dilakukan diatas standar atau dibawah standar ketika dibawah setandar oleh karna itu perlu melakukan pengadilan.²³

3. Alokasi Dana Desa

Dalam rangka meningkatkan pemberdayaan, kesejahteraan dan pemerataan pembangunan di pedesaan melalui dana APBD kabupaten, provinsi dan pemerintah pusat, pemerintah kabupaten, provinsi dan pemerintah pusat perlu merealisasikan dalam APBD masing-masing sebesar 10% untuk dana alokasi desa. Dengan mengalokasikan dana sebesar 10% diharapkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan di desa dapat menjadi kenyataan dan pemerataan pembangunan khususnya di pedesaan melalui dana APBD kabupaten provinsi dan pemerintah pusat sebesar 10% akan tercapai tingkat kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat yang tinggal di pedesaan²⁴

Dasar pemberian Alokasi Dana Desa adalah amanat Pasal 212 ayat

- (3) Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Desa, yang telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah NO. 72 Tahun 2005 tentang Desa khususnya Pasal 68 ayat (1) Sedangkan pemerintahan besaran ADD didasarkan pada Surat Menteri Dalam Negri Tanggal 22 Mei 2005 Nomor

²³Ernie Tisnawati Sule dan Kurniawan

²⁴Widjaja HAW, *Otonomin Desa* (Jakarta : RajaGrafindo), hal. 133

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

140/640/SJ perihal pedoman Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten Kota kepada Pemerintahan Desa.

Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penentuan besarnya ADD, antara lain :

- a. Rumusan ADD dipergunakan untuk menghitung besarnya Alokasi Dana Desa untuk setiap desa.
- b. hal yang sangat penting dalam menghitung besarnya alokasi dana desa adalah tersedianya data sebagai prasyarat utama perhitungan.
- c. Rumusan yang digunakan berdasarkan asas merata dan adil.
asas merata adalah besarnya bagian ADD yang sama untuk setiap desa, yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM) secara Proporsional untuk setiap desa berdasarkan Nilai Bobot Desa (BDx) yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu (misalnya variabel kemiskinan, ketejangkauan, pendidikan kesehatan dll), selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Proporsional.
- d. Besarnya presentase perbandingan antara asas merata dan adil ditetapkan oleh daerah, misalnya besarnya ADDM adalah 60% dari jumlah ADD dan besarnya ADDP (dana proporsional) adalah 40% dari jumlah ADD.²⁵

Pasal 212

- a. Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu yang baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik desa berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban.
- b. Hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menibulkan pendapatan, belanja dan pengelolaan keuangan desa.
- c. Sumber pendapat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 1. Pendapatan asli desa;
 2. Bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota;

²⁵ Wasistiono Sadu, Tahir Irwan *Prospek Pengembangan Desa*, (Bandung : Fokusmedia, 2006) , hal. 112-113

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota
4. Bantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota
- e. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga
- d. Belanja desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
- e. Pengelolaan keuangan desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) oleh kepala desa yang dituangkan dalam peraturan desa tentang anggaran pendapatan dan belanja desa.
- f. Pedoman, pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Bupati/Walikota dengan berpedoman pada peraturan perundang-undang.²⁶

Berlakunya undang-undang tersebut menimbulkan konsekuensi pemerintah Desa memperoleh dana yang dapat dikelola relatif besar. Di sisi lain, tentunya dana yang relatif besar tersebut harus bisa dikelola dan dipertanggungjawabkan dengan baik. Untuk itu, pemerintah juga telah mempersiapkan beberapa peraturan terkait untuk mendukung akuntabilitas dana desa. Peraturan Pemerintah Nomor 60/2014 membahas dana desa (sumber pendanaan APBN) yang diperbarui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 / 2015 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113/2014 (Republik Indonesia, 2014a, 2015). Berbagai peraturan di atas tidak dimaksudkan untuk mempersulit pemerintah perdesaan untuk mengelola dana desa, melainkan agar dapat dimanfaatkan dengan maksimal demi kemajuan perdesaan sekaligus dapat dipertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya. Namun, di sisi lain keterbatasan sumber daya mungkin menjadi kendala bagi pemerintah perdesaan untuk dapat mengelola sesuai aturan dan tujuan dibentuknya dana desa. Mengingat kebijakan dana desa masih merupakan sesuatu yang relatif baru dan belum banyak penelitian yang dilakukan guna melihat implementasi

²⁶Nurnidayat, *Otonomi Daerah Perimbangan Keuangan Antara Pusat Dan Daerah*, Bandung : nuansa aulia, 2005), hlm 70-71

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari kebijakan ini, sementara untuk suatu kebijakan baru perlu dilakukan evaluasi. Berlakunya undang-undang tersebut menimbulkan konsekuensi pemerintah Desa memperoleh dana yang dapat dikelola relatif besar. Di sisi lain, tentunya dana yang relatif besar tersebut harus bisa dikelola dan dipertanggungjawabkan dengan baik. Untuk itu, pemerintah juga telah mempersiapkan beberapa peraturan terkait untuk mendukung akuntabilitas dana desa. Peraturan Pemerintah Nomor 60/2014 membahas dana desa (sumber pendanaan APBN) yang diperbarui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 / 2015 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113/2014 (Republik Indonesia, 2014a, 2015). Berbagai peraturan di atas tidak dimaksudkan untuk mempersulit pemerintah perdesaan untuk mengelola dana desa, melainkan agar dapat dimanfaatkan dengan maksimal demi kemajuan perdesaan sekaligus dapat dipertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya. Namun, di sisi lain keterbatasan sumber daya mungkin menjadi kendala bagi pemerintah perdesaan untuk dapat mengelola sesuai aturan dan tujuan dibentuknya dana desa.²⁷

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan dana yang dialokasikan oleh pemerintah Kabupaten/Kota untuk desa yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten (Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005). Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan dana yang cukup signifikan bagi Desa untuk menunjang program-program Desa. Salah satu tujuan dari Alokasi Dana Desa (ADD) adalah pengentasan kemiskinan (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007). Akan tetapi seiring dengan besarnya jumlah Dana Desa, masalah kemiskinan masih sulit untuk diselesaikan.²⁸

²⁷ Meutia Intan, Lilina, "Pengelolaan Keuangan Dana Desa", *Jurnal Akuntansi Multiparadigma Jamal* Vol.8, No. 2 (31 Agustus 2017)

²⁸ Intan Mala Sari Intan, Abdullah M. Faisal, "Analisis Ekonomi Kebijakan Dana Desa Terhadap Kemiskinan Desa Di Kabupaten Jurnal Ekonomi Pembangunan Vol.15, No.1 (Juni 2017), 35-36



B. Kajian Terdahulu

Kajian terhadap pemberdayaan masyarakat miskin telah banyak dilakukan, akan tetapi sedikit sekali yang meneliti tentang realisasi alokasi dana desa. Hal ini penulis menjadi tertarik untuk menelitinya, penelitian sebelumnya yang menjadi acuan penelitian ini antara lain sbb:

a. Skripsi yang ditulis oleh Randhi Dian Purnama, (2017) Peran Badan Permasyarakatan Desa sebagai pengawas Dana Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa studi di Desa Rannaloe Kec. Bungaya Kab. Gowa. Dimana tekanan Randhi Dian Purnama meneliti tentang Peran Badan Permasyarakatan Desa sebagai pengawas Dana Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014, sedangkan penulis meneliti tentang Peran Badan Permasyarakatan Desa (BPD) dalam pengawasan dana desa.

b. Skripsi yang ditulis oleh Restiana Putri rahayu, dkk (2016) Peran Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Dalam Pengelolaan Dana desa studi kasus di Desa Pilang Kecamatan Masaran Kabupaten Sragen sedangkan tekanan penulis meneliti tentang peran badan permasyarakatan desa dalam pempataan dan pengelolaan dana desa.

Adapun persamaan judul peneliti diatas dengan peneliti yang sedang dilakukan ialah sama-sama melakukan penelitian mengenai peran badan permasyarakatan desa dengan metode deskriptif kualitatif. Sedangkan perbedaan pada penelitian ialah penelitian ini lebih menekankan pada peran badan permasyarakatan desa (BPD) dalam pengawasan dan dana desa di desa Batang Tumu.

C. Kerangka pikir

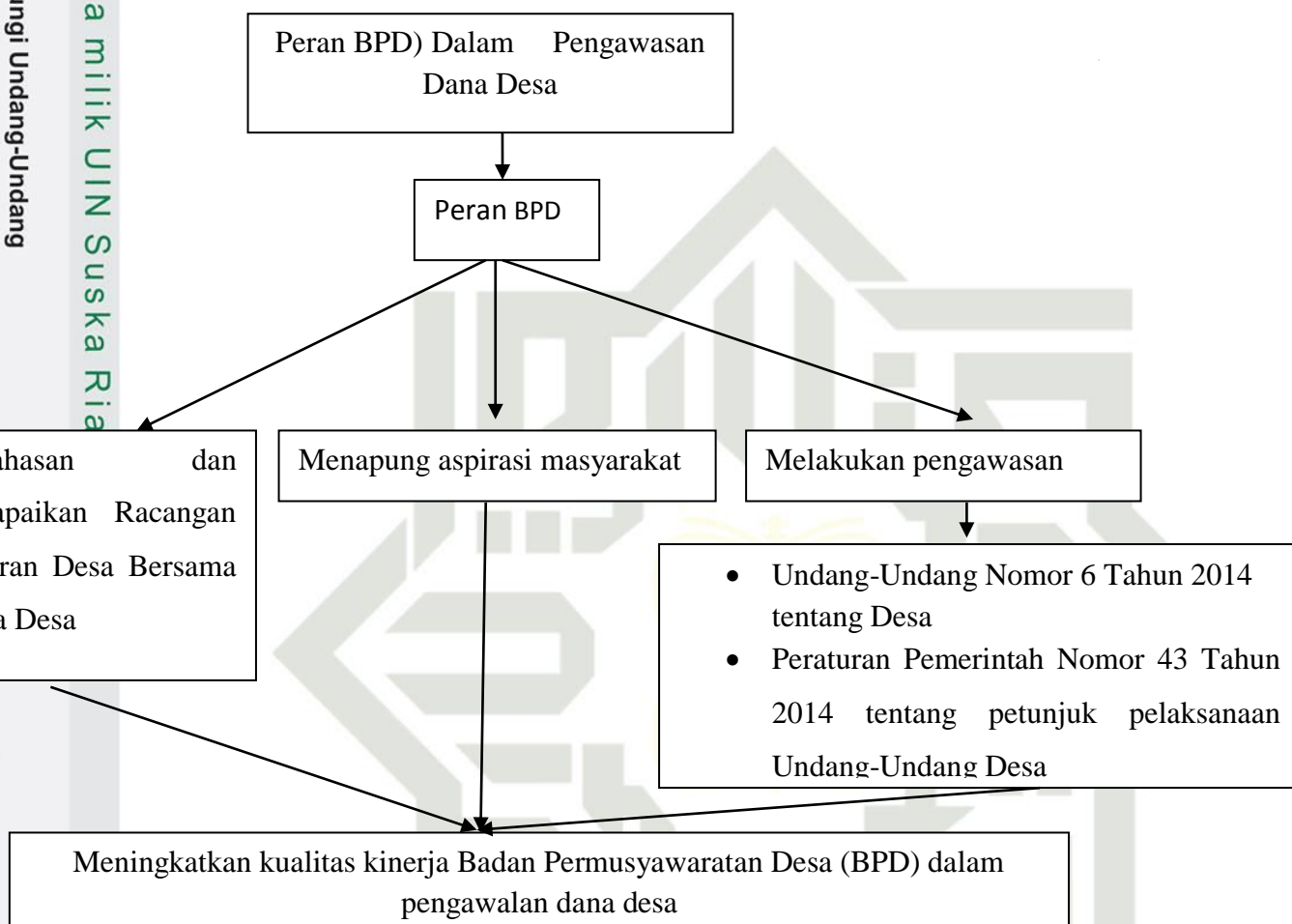
Yang dimaksud Peran Badan Permasyarakatan Desa (BPD) dalam pengawasan dana desa adalah keikutsertaan Badan Permasyarakatan Desa (BPD) dalam penggunaan dana desa baik digunakan dalam infrastruktur, ekonomi, dan pemberdayaan sehingga terrealisasi program pemerintahan desa setempat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Gambar I. 1
Kerangka Pikir





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini penelitian kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata terlulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati atau dilihat mengenai **Peran Badan BPD Dalam Pengawasan Dana Desa di Desa Batang Tumu Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir.**

B. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Batang Tumu Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir.

C. Informan Penelitian

Dalam penelitian ini terdiri anggota BPD setempat, tokoh masyarakat dan masyarakat yang terlibat dalam penggunaan dana desa di Desa Batang Tumu Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir.

D. Sumber Data

Data yang dikumpulkan dan diperoleh dalam penelitian ini dapat dikelompokkan:

1. Data Primer: data yang diperoleh langsung dari responden melalui informasi dari hasil observasi dan wawancara terkait Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pengawasan Dana Desa di Desa Batang Tumu Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir.
2. Data Sekunder: data yang diperoleh melalui dokumentasi atau gambar lainnya untuk menunjang objek yang teliti, terutama terkait dengan Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pengawasan Dana Desa di Desa Batang Tumu Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Teknik Pengumpulan Data

teknik pengumpulan data dipenelitian ini aratalain:

1. Observasi; dilakukan dengan cara mengamati langsung tentang bagaimana upaya Peran BPD Dalam Pengawasan Dana Desa di Desa Batang Tumu Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir.
2. Wawancara; dilakukan melalui tanya jawab secara langsung dengan responden untuk memperoleh data tentang Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pengawasan Dana Desa di Desa Batang Tumu Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir.
3. Dokumentasi; dilakukan penulis dengan cara mengumpulkan data yang terkait dengan Peran BPD Dalam Pengawasan Dana Desa di Desa Batang Tumu Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir.

F. Validtas Data

Agar validnya data yang diperoleh dalam sebuah penelitian harus menggunakan tringulasi. Yang dimaksud dengan tringulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Teknik tringulasi yang paling banyak digunakan ialah pemeriksaan kabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pemanding terhadap data itu. Teknik tringulasi yang paling banyak digunakan ialah pemeriksaan melalui sumber lainnya. Dezin membedakan empat macam tringulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan *sumber, metode penyidik, dan teori*.

Tringulasi dengan *sumber* berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif (Patton). Hal itu dapat dicapai dengan jelas cara : (1) membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara, (2) memandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang katakannya secara pribadi, (3) memandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa dikatakan sepanjang waktu.



G. Teknik Analisia Data

Teknik analisia data yang digunakan ialah dengan cara kualitatif. Berikutini adalah teknik-teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini:

1. Tahap Pengumpulan Data

Dalam proses analisis data interaktif ini kegiatan yang pertama adalah proses pengumpulan data dengan cara berupa kata-kata, fenomena, foto, sikap dan perilaku keseharian yang diperoleh oleh peneliti dari hasil observasi mereka dengan menggunakan beberapa teknik seperti observasi, wawancara dokumentasi yang menggunakan alat bantu yang berupa kamera, *vidio tape*. Pada tahap ini peneliti melakukan proses pengumpulan data dengan menggunakan teknik pengumpupulan data yang telah ditentukan sejak awal. Proses pengumpulan data harus sebagaimana diungkap dimuka harus melibatkan sisi aktor (informan), aktivitas, latar atau konteks terjadinya pristiwa.

2. Tahap Reduksi Data

Reduksi data dapat diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyerdehanaa, pengabstrakan dan transformasi data yang mucul dari catatan-catatan tertulis dilapangan.

Tahap reduksi data merupakan bagian kegiatan analisis sehingga pilihan-pilihanpeelitia tentang bagian data mana yang dikode, dibuang, pola-pola mana yang meringkas sejumlah bagian tersebut, cerita-cerita apa yang berkembang, merupakan pilihan-pilihan analisis. Dengan beverifikasi gitu proses reduksi data dimaksud untuk lebih menajamkan, menggolonkan, mengarahkan dan membuang bagian data yang tidak diperlukan, serta mengorgasnisasi data sehingga memudahkan untuk dilakukan penarikan kesimpulan yang kemudian akan dilanjutkan dengan proses.

3. Display Data

Langkah berikutnya setelah proses reduksi data berlangsung adalah penyajian data yaitu sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memebri kemukinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan data

4. Verifikasi dan Tahapan Penarikan Kesimpulan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

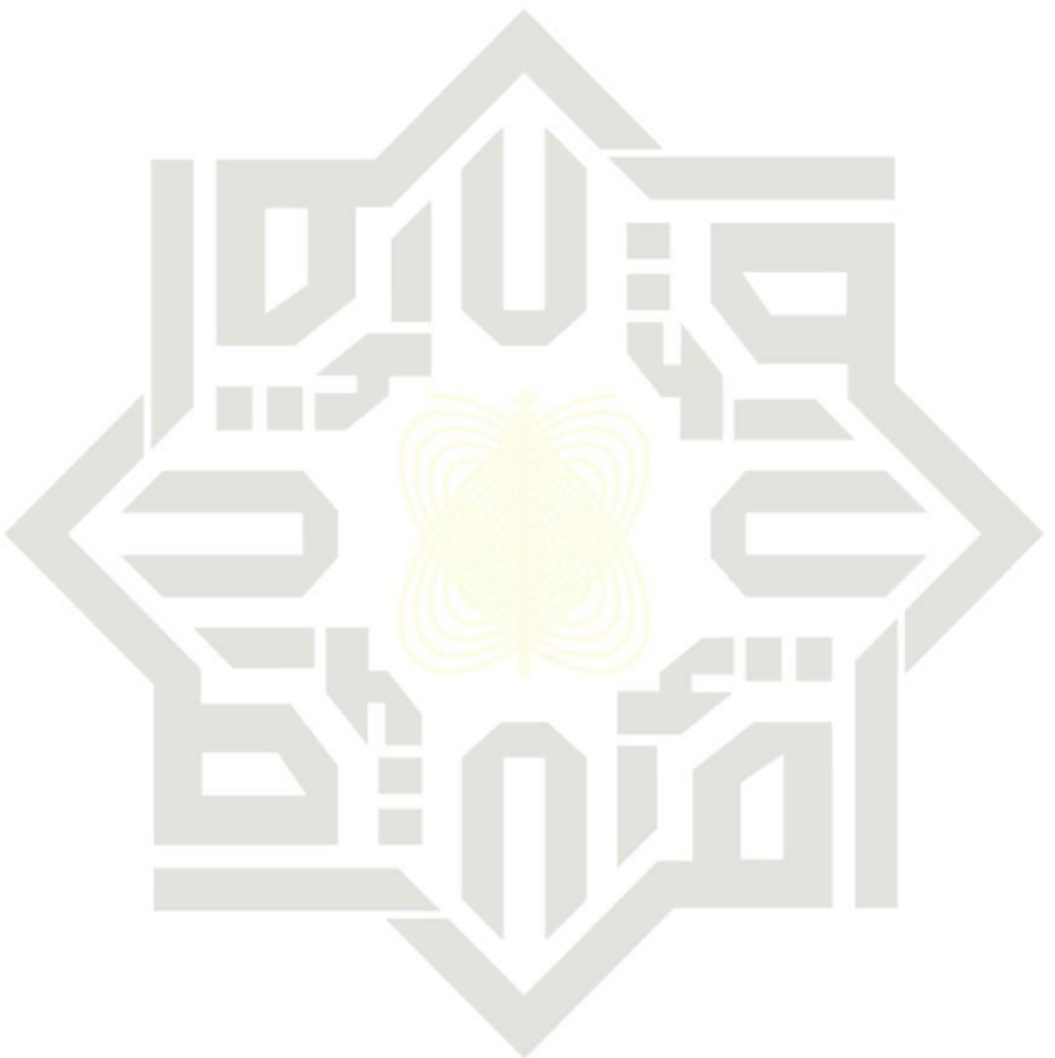
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tahap akhir pengumpulan data adalah verifikasi dan penarikan kesimpulan, yang dimaknai sebagai arti data yang telah disampaikan



UIN SUSKA RIAU

BAB IV

GAMBARAN UMUM (SUBJEK PENELITIAN)

A. Kondisi Desa

Secara administratif Desa Batang Tumu termasuk dalam wilayah kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau dan terletak dibagian Selatan merupakan salah satu Desa yang maju didukung oleh berbagai sarana prasarana , Desa Batang Tumu dilihat secara umum keadaanya merupakan daerah perairan dengan kondisi alam yang dialiri oleh sungai yaitu sungai Batang Tumu.

B. Sejarah Desa

Pada awalnya Desa Batang Tumu merupakan semak belukar. Satu persatu penduduk berdatangan ke desa ini untuk membuka lahan perkebunan kelapa dan pohon rumbia yang menjadi andalan utama dan pencaharian asli masyarakat. Desa ini ada aliran sungai yang mengalir sampai ke Desa Terusan Kempas kecamatan Gaung Anak Serka. Desa Batang Tumu mulai berdiri pada tahun 1984. Mayoritas penduduk Desa Batang Tumu suku melayu dan ditambah dengan suku lain seperti banjar, jawa, bugis. Nama desa Batang Tumu di ambil dari nama sebatang pohon yaitu pohon tumu yang batangnya lurus dan sangat tinggi dan dapat digunakan sebagai alat bangunan tempat tinggal dan bangunan lainnya.

Sejak berdirinya desa ini sudah banyak pergantian pimpinan desa Pada tahun 1984 diadakan pemilihan Kepala Desa pertama yang dimenangkan oleh Bapak Abdurhman Abu. Kemudian pada tahun 1991 diadakan pemilihan kepala desa yang kedua yang dimenangkan oleh Saibani honggowijoyo dan menjabat selama dua periode. Dan tahun 2004 diadakan pemilihan kepala desa ketiga yang dimenangkan oleh Sahidir Awang dan tahun 2010 diadakan pemilihan desa yang keempat dan masih dimenangkan oleh Bapak Sahidir Awang akan tetapi tidak sempat menghabiskan jabatan satu periode karena tepat pada bulan Desember tahun 2013 beliau meninggal dunia kemudian jabatan kepala desa diteruskan oleh oleh sekretaris desa yaitu Bapak Sulaiman sebagai Pejabat Sementara. Dan pada tahun 2017 Bapak TARMIZI terpilih sebagai Kepala Desa Depenitif melalui pemilihan Kepala Desa.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun pejabat Kepala Desa Batang tumu sejak mulai berdiri sampai sekarang sebagai berikut :

- Tahun 1984 – 1990, ABDURHMAN ABU sebagai Kepala Desa dan Yon Samsir sebagai Sekretaris Desa
1. Tahun 1997 - 2003 SAIBANI HONGGOWIJOYO sebagai Kepala Desa dan RIDWAN JAS sebagai Sekretaris Desa dan periode selanjutnya M RAUS MONTEL.
2. Tahun 2004 - 2011 SAHIDIR AWANG Kepala Desa dan SULAIMAN, sebagai Sekretaris Desa yang sudah menjadi PNS.
3. Tahun 2011-2016 SUHAIDIR AWANG terpilih kembali untuk priode kedua, meskipun tidak sampai 5 tahun karna beliau meninggal dunia setelah menjabat 2 tahun,selanjutnya pemerintahan Desa Batang tumu, dipimpin oleh Bpk. SULAIMAN sebagai Pejabat sementara hingga ahir priode, dan beliau menunjuk MUSTAFA sebagai PLT Sekretaris Desa.
4. Tahun 2017 diadakan Pemilihan Kepala Desa dengan 5 Calon yang lulus seleksi, pada Pemilihan Kepala Desa ini terpilihlah TARMIZI sebagai Kepala Desa Batang Tumu (2018-2023) dengan menunjuk ROZI BADLI sebagai Sekretaris Desa

C. Letak Demografi Desa

Desa Desa Batang Tumu termasuk dalam wilayah kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir secara geografis terletak di wilayah persisir riau dengan kondisi lahan gambut dan rawa-rawa, desa batang tumu sangat dekat dengan laut malaka . Adapun jarak tempuh ibu kota kecamatan 15 km dengan menggunakan waktu 60 menit dan jarak tempuh ke ibu kota kabupaten 55 km dengan menggunakan 90 menit.

Batas wilayah desa Batang Tumu kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir sebagi berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Bantayan
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Terusan Kempas
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sepakat jaya
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Bakau Aceh

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Luas Wilayah Desa Batang Tumu adalah 42km² dengan kondisi tanah datar. Desa Batang Tumu Kecamatan Mandah Kabupaten Indragirihilir adalah desa tertau kedua di kecamatan mandah dengan mayoritas penduduk melayu persisir. Sebagai desa yang terletak di kabupaten Indragirihilir batang tumu juga menjadi desa perpenghasilan kelapa dengan luwas lahan perkebunan kelapa 41950 ha.²⁹

Tabel II. 1
Luas Wilayah³⁰

1	Pemukiman	50 ha
2	Pertanian/Perkebunan	41950 ha
3	Kebun Kas Desa	1 ha
4	Perkantoran	1 ha
5	Sekolah	5 ha
6	Jalan	15 Km
7	Lapangan bola kaki dan bola volly	5 ha
Luas wilayah		42 Km ²

Tabel II. 2
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin³¹

Kepala Keluarga	872 kk
Laki-laki	1741 Jiwa
Perempuan	1741 Jiwa
Jumlah	3595 Jiwa

²⁹Dokumen Desa Batang Tumu, (*Sejarah Desa*), Desa Batang Tumu Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir 2019

³⁰Dokumen Desa Batang Tumu, (*Luas Wilayah*), Desa Batang Tumu Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir 2019

³¹Dokumen Desa Batang Tumu (*Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin*), Desa Batang Tumu Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir 2019

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel II. 3
Pendidikan³²

1	PAUD/TK	70 Orang
2	SD	523 Orang
3	MDA	80 Orang
4	DTA	79 Orang
5	SLTP/ MTs	250 Orang
6	SLTA/ MA	128 Orang
7	S1/ Diploma	35 Orang
8	S2	0 Orang
9	Putus Sekola	15 Orang
10	Buta Huruf	60 Orang

Tabel II. 4

Data Keagamaan Desa Batang Tumu Tahun 2019 Jumlah Pemeluk³³

1	Islam	100 % orang
2	Budha/Konghucu	- orang
3	Kristen	- orang

Tabel II. 5

Data Tempat Ibadah³⁴

1	Masjid	5 unit
2	Musholla	9 unit

³²Dokumen Desa Batang Tumu, *(Pendidikan)*, Desa Batang Tumu Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir 2019

³³Dokumen Desa Batang Tumu, *(Data Keagamaan Desa Batang Tumu Tahun 2019 Jumlah Pemeluk)*, Desa Batang Tumu Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir 2019

³⁴Dokumen Desa Batang Tumu, *(Data Tempat Ibadah)*, Desa Batang Tumu Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir 2019

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel II. 6
Struktur Mata Pencaharian³⁵

	Petani	612 orang
	Pedagang	150 orang
	PNS	15 orang
	Tukang	15 orang
	Guru	45 orang
	Bidan/ Perawat	7 orang
	Polri	1 orang
	Pesiunan	0 orang
	Sopir/ Angkutan	0 orang
10	Buruh	67 orang
11	Jasa persewaan	5 orang
12	Swasta	7 orang

D. Kondisi Pemerintahan Desa Dan Pembagian Wilayah Desa

Pembagian wilayah Desa Batang Tumu menjadi 3 (tiga) dusun; yaitu I, II, III, IV, dan V. Setiap wilayah di dusun dipimpin oleh kepala dusun

1. Pembagian Wilayah Desa

Desa Batang Tumu terbagi ke dalam 5 Dusun terdiri dari

³⁵ Dokumen Desa Batang Tumu, (*Struktur Mata Pencaharian*), Desa Batang Tumu Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir 2019

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel II. 7
Jumlah Dusun³⁶

No	Dusun	RW	RT
1	I	II	IV
2	II	II	VI
3	III	II	III
4	IV	II	IV
5	V	III	VII

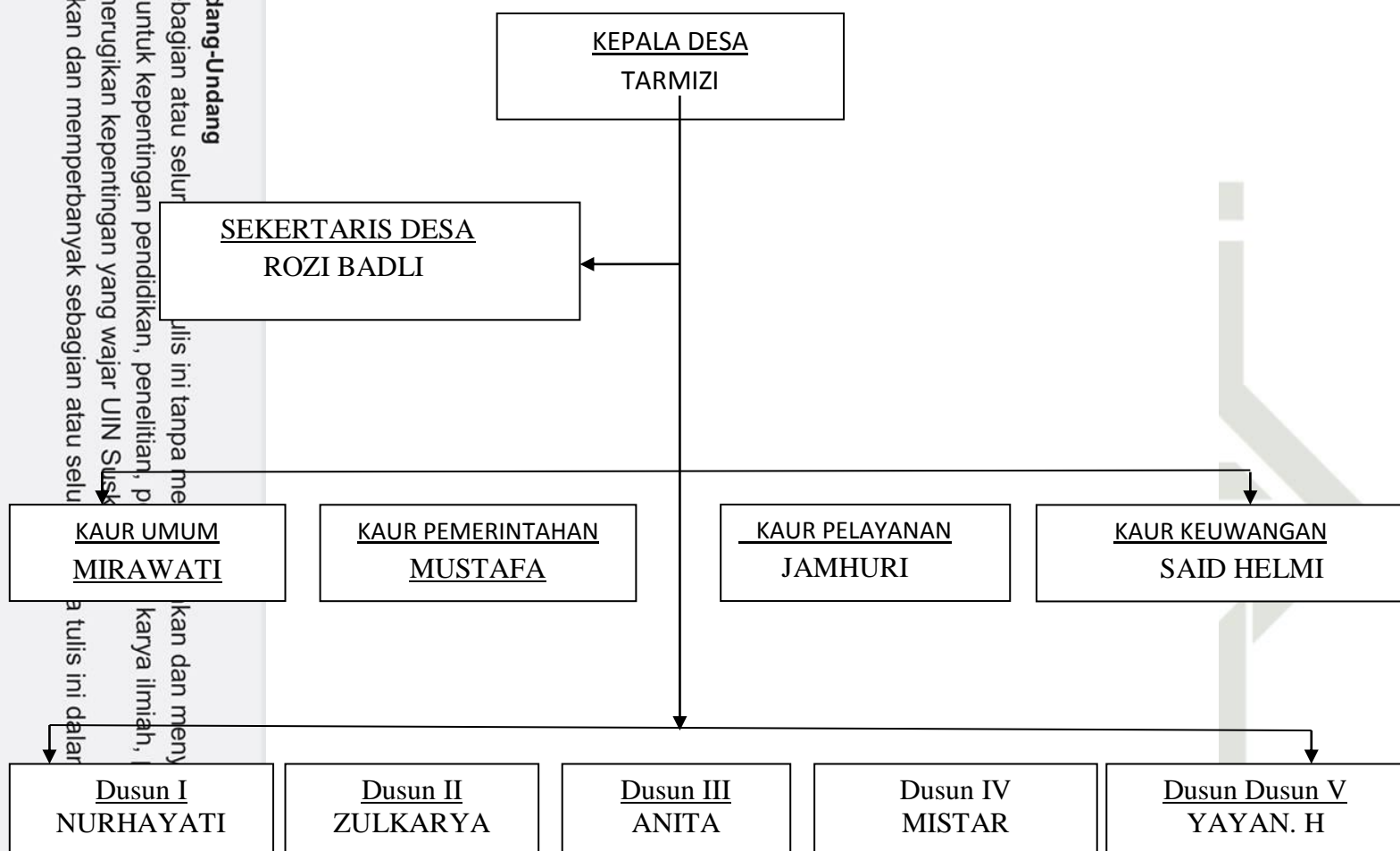
Tabel II. 8
Lembaga Kemasyarakatan³⁷

1	LPM	1 Kelompok
2	PKK	1 Kelompok
3	Posyandu	2 Kelompok
4	Pengajian	6 Kelompok
5	Arisan	3 Kelompok
6	Simpan Pinjam	2 Kelompok

³⁶ Dokumen Desa Batang Tumu, (*Jumlah Dusun*), Desa Batang Tumu Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir 2019

³⁷ Dokumen Desa Batang Tumu, (*Lembaga Kemasyarakatan*), Desa Batang Tumu Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir 2019

Gamabar II. 9
SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA
BATANG TUMU KECAMATAN MANDAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR³⁸



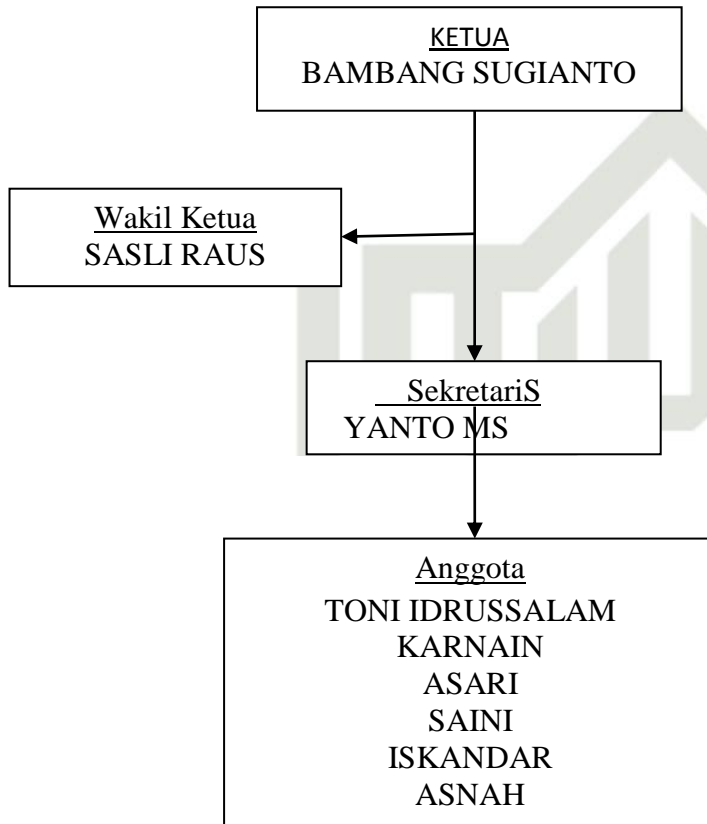
³⁸ Dokumen Desa Batang Tumu, (*Susunan Organisasi Pemerintahan Desa Batang Tumu Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir*), Desa Batang Tumu Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir 2019

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gamabar IL 10

SUSUNAN ORGANISASI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA BATANG KECAMATAN MANDAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR³⁹



³⁹ Dokumen Desa Batang Tumu, (*Susunan Organisasi BPD Desa Batang Tumu*), Desa Batang Tumu Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir 2019

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelusuran data lapangan dan dilakukan pembahasan maka diperoleh kesimpulan bahwa BPD berperan penting dalam pengawasan di Desa Batang Tumu hal ini dibuktikan yaitu BPD mengayomi masyarakat, melindungi masyarakat, perpihak kepada masyarakat, menyampaikan aspirasi masyarakat, menampung keluhan-keluhan masyarakat, dan menindak lanjuti dengan cara disampaikan ke instansi dan lembaga terkait.

B. Saran

1. Lebih meningkatkan hubungan kerja sama antara BPD dan pemerintah Desa agar meminimalisir keluhan masyarakat desa di Desa Batang Tumu.
2. BPD seharusnya tidak hanya memokuskan kerja pada pengawasan proyek-proyek karan Dana Desa tidak Keseluruhan digunakan pada ispratuktur ada juga dana desa digunakan untuk peberdayaan dan pembinaan
3. kepada BPD itu sendiri hendaknya meberikan sebetulnya pemahaman kepada sesama anggota BPD karena selama penulis terjun lapangan ada sebagian dari anggota BPD yang tidak memahami kerja BPD itu sendiri
4. kepada ketua BPD kendaknya besikap tegas dan memberi sanksi pada anggota yang tidak aktif.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.
Jakarta: Balai Pustaka
- Herujilo, Yayat M. 2001. *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta: PT Grasindo.
- Nurnidayat. 2005. *Otonomi Daerah Perimbangan Keuangan Antara Pusat Dan Daerah*. bandung : nuansa aulia.
- Radjab, Dasril. 2005. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Rahardjo, Adisasmita. 2006. *Pembangunan Pedesan dan Perkotaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sadu, Wasistiono dan Tahir Irwan. 2006. *Prospek Pengembangan Desa*. Bandung : Fokusmedia.
- Siagian, Sondang. P. 2004. *Filsafat Administrasi*. Jakarta Gunung Agung.
- Soekanto, Soerjono. 2013. *Sosiologi suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali press.
- Sule, Erni Tisnawati dan Kurniawan Suefullah. *Pengantar Manajemen*. Jakarta Prenada Media Group
- Widjaja, HAW. 2005. *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada,
- _____. 2008. *Otonomi Desa*. Jakarata: RajaGrafindo.
- Undang-Undang Desa No 6 tahun 2014.

B. Jurnal

- Itan, Meutia dan Lilina. 2017. “*Pengelolaan Keuangan Dana Desa*”. Jurnal Akuntansi Multiparadigma.
- Itan, Mala Sari dan Abdullah M. Faisal. 2017. “*Analisis Ekonomi Kebijakan Dana Desa Terhadap Kemiskinan Desa*. Jurnal Ekonomi Pembangunan.
- Safitri, Sani. 2016. “*Sejarah Perkembangan Otonomi Daerah Di Indonesia*”. Jurnal Criksetra.

C. Skripsi

- Parnama, Randhi dian. 2017. *Peran Badan Permusyawaratan Desa sebagai pengawas Dana Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



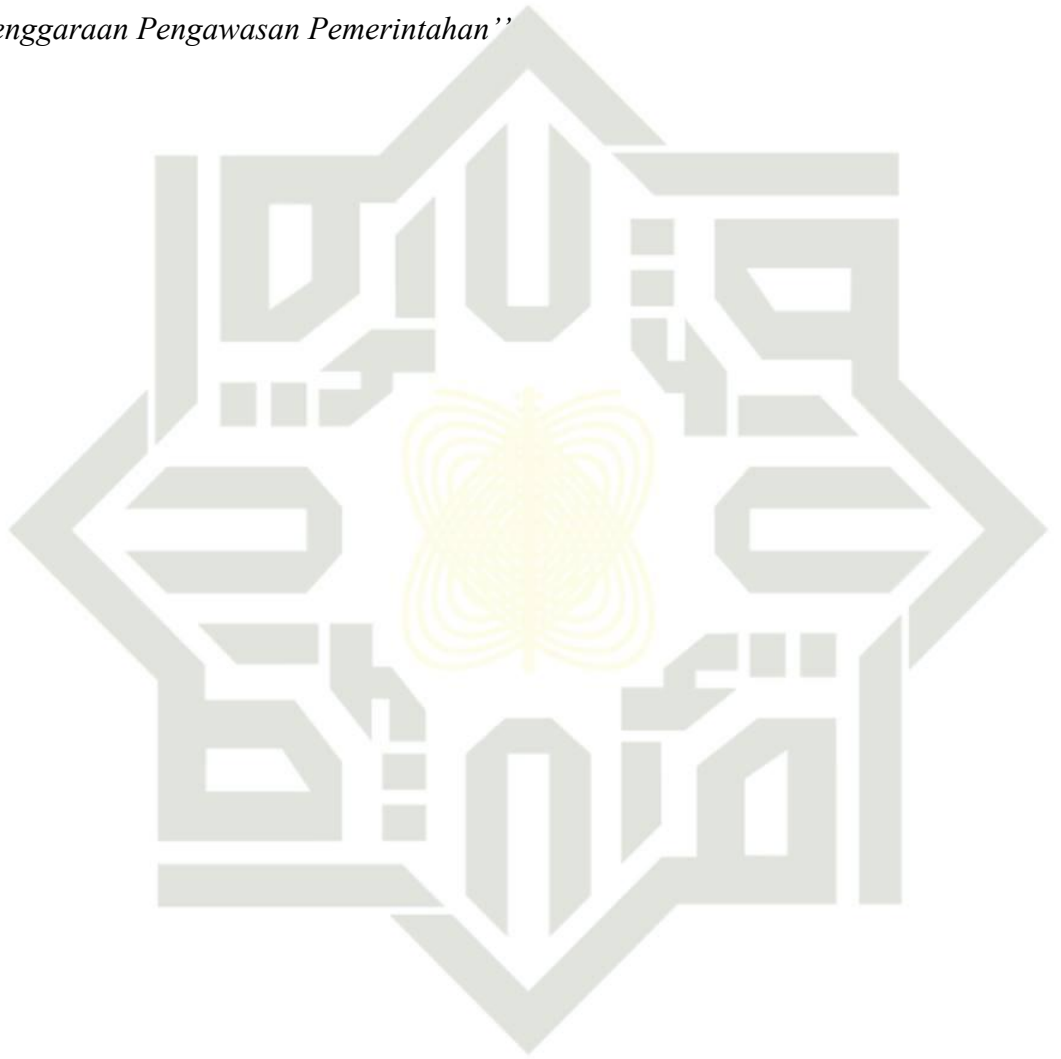
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tentang Desa (Studi Di Desa Rannaloe Kec. Bungaya Kab. Gowa).
Makkassar: Program S1 UIN Alauddin.

Langoy, Fitrianingsih. *Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Dalam Pembangunan*

Awaeh, Stewar. Dkk. *“Peranan Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Penyelenggaraan Pengawasan Pemerintahan”*



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau
Sultan Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

LAMPIRAN I

KISI-KISI INSTRUMENT PENELITIAN

Judul	Variabel	Indikator	Sub indikator	Item	Teknik pengumpulan data
Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pengawasan Dana Desa di Desa Batang Tumu Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir.	Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pengawasan Dana Desa	Pembahasan dan Menyampaikan Rancangan Peraturan Desa Bersama Kepala Desa	Permandegri NOMOR 111 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PERATURAN DI DESA	1	Wawancara, observasi dan dokumentasi
		Menampung aspirasi masyarakat		7	Wawancara, observasi dan dokumentasi
		Melakukan pengawasan	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang petunjuk pelaksanaan Undang-Undang Desa.	4	Wawancara, observasi dan dokumentasi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN II
REDUKSI DATA

NO	INDIKATOR	RESPONDEN	HASIL WAWANCARA
1	Pembahasan dan Menyapaikan Racangan Peraturan Desa Bersama Kepala Desa	BAMBANGSUGIANTO SASLI RAUS YANTO MS ASARI SAINI YUSRIZAL AHMAT TARMIZI	Pembahasan dan menyepakati rancangan peraturan desa Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Desa Batang Tumu melakukan Pembahasan dan menyepakati rancangan peraturan desa dilakukan setiap dana desa hendak dicair atau sebulan sebelum dana desa dicairakan yakni tepatnya pada Mei dan November adapun yang dibabas oleh BPD, bersma perangkat desa, kepala desa, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pendidikan RT, dan RW. Berapa banyak uang digunakan untuk penyelengaran pemerintah desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyaraktan desa, pemberdayaan masyarakat desa dan belanja takterduga. Setelah kelima kelompok dana desa itu dibahas barulah BPD



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		menyampaikan racangan-racangan peraturan desa bersama Kepala Desa.
Menapung aspirasi masyarakat	BAMBANGSUGIANTO SASLI RAUS YANTO MS ASARI SAINI YUSRIZAL AHMAT TARMIZI	menapung aspirasi masyarakat ada beberapa cara BPD Desa Batang Tumu yaitu dengan mendengar langsung apa yang dikeluhkan oleh masyarakat dalam hal ini biasanya BPD Desa Batang Tumu mendengarkan langsung rumor yang terjadi dimasyarakat dalam hal ini biasanya BPD Desa Batang Tumu mengecek langsung lokasi atau BPD datang masyarakat dan cara selanjunya masyarakat datang dan menceritakan apa yang telah terjadi baik dalam kinerja pemerintah desa maupun pungenan ADD atau mikanisme pembangunan. Setelah beberapa aspirasi masyarakat didapatkan maka BPD Desa Batang Tumu mengadakan musyawarah bersama anggota BPD itu sendiri setelah itu salah satu dari utusan dari BPD menyampikan aspirasi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

			masyarakat tersebut ke Kapala Desa atau jaajaranya
	Melakukan pengawasan	BAMBANGSUGIANTO SASLI RAUS YANTO MS ASARI SAINI YUSRIZAL AHMAT TARMIZI	Ada dua cara BPD Desa Batang Tumu dalam melakukan pengawasan baik itu pengawasan kinerja pemerintah desa maupun pengawasan ADD yang pertama pengawasan dilakukan di atsmitrasi pengawasan ini adalah pengawasan pendanan agar tidak terjadi penyelwengan dana desa dan pengawasan dilapangan biasanya pengawasan ini dilakukan pada saat berjalanya mebangunan, pemberdayaan dan pembinaan masyarakat



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta dilindungi UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

LAMPIRAN III

PEDOMAN WAWANCARA

Nama :

Jabatan :

Hari/ Tanggal :

Jam :

Adapun beberapa pertanyaan yang akan dipertanyakan kepada informan yaitu sebagai berikut

1. Kapan pembahasan dan menyepakati racangan peraturan desa bersama Kepala Desa dilaksanakan?

2. Bagaimana cara BPD dalam melindungi aspirasi masyarakat ?

3. Mengenai dana desa. berapa kali pernah terjadi konflik masyarakat dan perangkat desa?

4. Berapa kali masyarakat datang kepada BPD untuk mengemukakan permasalahan-permasalahan mengenai kinerja pemerintahan desa dan juga masalah lainnya?

5. Apakah pernah masyarakat datang dan menyakan tentang pengeluaran dana desa?

6. Apa saja permasalahan yang sering dikeluh oleh masyarakat?

7. Bagaimana cara BPD dalam menampung aspirasi masyarakat?

8. Peran dan tugas pokok BPD adalah melakukan pengawasan atas penggunaan dana desa. BPD melakukan audit ?

9. Selanjutnya berapa orang anggota BPD yang melakukan pengawasan aktif terhadap dana desa?

10. Selanjutnya berapa orang anggota BPD yang melakukan pengawasan aktif terhadap dana desa?

11. Bagaimana cara-cara BPD melakukan pengawasan terhadap dana desa?



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

LAMPIRAN IV

HASIL WAWANCARA

Nama : Bambang Sugianto
Jabatan : ketua BPD Desa Batang Tumu
Hari/ Tanggal : Senin, 03 Juni 2019
Jam : 17.30 s/d 19.30 WIB

Adapun beberapa pertanyaan yang akan dipertanyakan kepada informan yaitu sebagai berikut:

Kapan pembahasan dan menyepakati racangan peraturan desa bersama kepala desa dilaksanakan?

Jawaban:

“Setiap ada dana desa dicairkan”

2. Bagaimana cara BPD dalam melindungi aspirasi masyarakat ?

Jawaban:

“Adapun cara kami BPD melindungi aspirasi masyarakat dengan menggunakan cara santun dalam menyampikan keluhan-keluhan masyarakat agar tidak terjadi komplik antara aparat desa dan masyarakat”.

Mengenai dana desa, berapa kali pernah terjadi konflik masyarakat dan perangkat desa?

Jawaban:

“ Untuk sampai saat ini belum ada lagi”

Berapa kali masyarakat datang kepada BPD untuk mengeluhkan permasalahan-permasalahan mengenai kinerja pemerintahan dan juga masalah lainnya?

Jawaban:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

'Karna saya menjadi bagian BPD dua priode maka udah bayak juga masyarakat datang kesaya untuk mengeluhkan permasalahan-permasalahan di Desa ini, yang jelasnya seringah masyarakat datang kesaya''

Apakah pernah masyarakat datang dan menayakan tentang pengeluaran dana desa?

Jawaban:

'Untuk sejauh ini belum ada lagi warga datang menayakan tentang dana desa''

Apa saja permasalahan yang sering dikeluh oleh masyarakat?

Jawaban:

'Banyak sekali yang jelas yang sering dikeluh masyarak itu adalah adallah masalah kinerja Kepala Desa dan pembangunan yg ada disini''

7. Bagaimana cara BPD dalam menapung aspirasi masyarakat?

Jawaban:

'Kami dari BPD cara kami menapung asprasi adalah dengan mendengar dulu permasalahan dari masyarakat lalu kami tampung kemudian kami dari BPD rapat kami rembuk bersama lalu kami sampai ke pada pemerintah desa''

Peran dan tuggas pokok BPD adalah melakukan pengawasan atas penggunaan dana desa. BPD melakukan audit ?

Jawaban:

'Saya Pernah melakukan audit baik audit di kantor baik ada ada pembangunan didesa ini yang digunakan dari dana desa''

Selanjutnya berapa orang angota BPD yang melakukan pengawasan aktif terhadap dana desa?



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jawaban:

“Untuk saat ini yang tidak aktif sama sekali anggota BPD yaitu Pak Saini karna beliau pun sudah tidak tinggal disini lagi, saya mengatakan ini bisa dipertanggung jawabkan”

Apakah BPD pernah melakukan pengawasan terhadap pembangunan-pembangunan yang angran tersebut didapatkan dari dana desa?

Jawaban:

“Pernah, setiap ada pembangunan saya selalu mengawasi berjalanya pembangunan tersebut”

11. Sagaimana cara-cara BPD melakukan pengawasan terhadap dana desa?

Jawaban:

“Ada dua cara pengawasan dana desa yang pertama yaitu pengawasan di kantor dan dilapangan”

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Proses wawancara bersama Yanto MS di kediamannya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



MUSRENBANGDES TAHUN ANGGARAN 2020

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BPD rapat bersama Kepala Desa Dan Aparat Desa



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Peroses Wawancara Bersama Bapak Yusrizal

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pengawasan Dana Desa di Desa Batang Tumu dengan ini menerangkan bahwa

Nama : MADRI
NIM : 11541104888
Fakultas : jurusan
Jenjang : S-1 (Strata 1)
Judul penelitian : **“ Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pengawasan Dana Desa di Desa Batang Tumu”**
Lokasi penelitian : Desa Batang Tumu Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir

Selanjutnya yang bersangkutan telah melaksanakan pannelitian/ Riset di Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pengawasan Dana Desa di Desa Batang Tumu Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir.

Demikianlah surat kereragan ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Mengetahui,

Batang Tumu, 5 juli 2019



UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Akasia No.01 Telephone ☎ (0768) 22904 Faximile (0768) 21383
Tembilahan Kode Pos 29211

**REKOMENDASI PENELITIAN
DAN PENGUMPULAN DATA (SURVEY)**

Nomor : 070/BKBP-POLMAS/2019/IT6

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN INDRAGIRI HILIR, berdasarkan surat dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu pintu Provinsi Riau Nomor : 503/DEPMPTSP/NON IZIN-RISET/22426 Tanggal 3 Mei 2019, Tentang Pelaksanaan kegiatan **Riset** dan Pengumpulan Data Untuk Bahan **Skripsi**, dengan ini memberikan Rekomendasi kepada :

Nama : **MADRI**
NIM : 11541104888
Program studi/Jenjang : Pengembangan Masyarakat Islam / S1
Alamat : Tokolan Darat Kec. Mandah
Judul Penelitian : **PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PENGAWASAN DANA DESA DI DESA BATANG TUMU KECAMATAN MANDAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**
Lokasi Penelitian : **DESA BATANG TUMU KECAMATAN MANDAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

Untuk melakukan penelitian dan pengumpulan data dengan ketentuan :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang tidak ada hubungannya dengan penelitian dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan penelitian selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal 9 Mei s/d 9 Agustus 2019.

Demikian rekomendasi ini diberikan, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan informasi dan data yang diperlukan dalam penelitian ini.

Tembilahan, 9 Mei 2019

a.n **KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

Kabid Kewaspadaan dan Pengawasan Orang Asing



KAMALUDDIN, S.Sos, M.Si

Pembina
NIP. 19711111 199503 1 003

Tembusan : Disampaikan kepada Yth ;

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau di Pekanbaru.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEMERINTAH PROVINSI RIAU

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I & II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jenderal Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39119 Fax. (0761) 39117, PEKANBARU
Email : dpmptsp@riau.go.id

Kode Pos : 28126



182010

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/22426
T E N T A N G

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.IV/PP.00.9/3212/2019 Tanggal 9 April 2019**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

1. Nama : **MADRI**
2. NIM / KTP : **11541104888**
3. Program Studi : **PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM**
4. Jenjang : **S1**
5. Alamat : **PEKANBARU**
6. Judul Penelitian : **PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PENGAWASAN DANA DESA DI DESA BATANG TUMU KECAMATAN MANDAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**
7. Lokasi Penelitian : **DESA BATANG TUMU KECAMATAN MANDAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

Dengan Ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan ini.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dibuat.

Demikian Rekomendasi ini diberikan agar dapat digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini dan terima kasih.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 3 Mei 2019



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :
Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI RIAU

Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Indragiri Hilir

Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Tembilahan



RIWAYAT HIDUP PENULIS

Penulis di lahirkan di Desa Batang Tumu, Kecamatan Mandah Kabupaten Indragilihilir pada tanggal 23 Desember 1995 dan diberi nama “Madri” dari pasangan Sapri dan Dayang. Penulis memulai pendidikan pertama kalinya di SDN 004 Pasangan Recil (2002-2008), kemudian penulis melanjutkan pendidikan di MTS Tarbiyah Islamiyah di Pasar Tokolan (2008-2011), selanjutnya penulis melanjutkan ke MAN Mandah (2011-2014).

Setelah selsai dari pedidikan ditingkat sekolah menengah atas penulis sempat kerja selama satu tahun di perusahaan suwasta yang ada Indragili Hilir, pada tahun 2015 penulis melanjutkan salah satu universitas di Provinsi Riau yaitu Universitas Islam Negri Sultan Syraif Kasim Riau (UIN SUSKA RIAU) dengan mengambil jurusan Pengembangan Masyarakat Islam (PMI) Fakultas Dakwah dan Komunikasi (FDK) yang dimulai pada tahun 2015. Dan atas rahmat Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “ *Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pengawasan Dana Desa di Desa Batang Tumu Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir.*

UIN SUSKA RIAU